KEDIRI BERBUDAYA

RENCANA KERJA

DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI

TAHUN 2026



Informasi

Email : diskominfo@kedirikab.go.id
Website: diskominfo.kedirikab.go.id
Telp. : (0354) 696714

Alamat

Jl. Sekartaji No.2 Doko
Kecamatan Ngasem
Kabupaten Kediri

KATA PENGANTAR

Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas rahmat dan karunia-Nya, sehingga Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2026 dapat diselesaikan dengan baik. Renja ini merupakan dokumen perencanaan strategis yang menjadi pedoman bagi seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika dalam melaksanakan tugas dan fungsinya selama tahun 2026.

Penyusunan Renja tahun 2026 ini berlandaskan pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Kediri dan secara spesifik merupakan implementasi dari Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Renja ini juga selaras dengan visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan pelayanan publik yang prima melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika memegang peranan penting dalam mendukung Visi tersebut, khususnya dalam mengakselerasi transformasi digital di Kabupaten Kediri. Melalui Renja ini, kami memfokuskan program dan kegiatan pada peningkatan infrastruktur TIK, pengembangan aplikasi pemerintahan yang terintegrasi, peningkatan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK, serta optimalisasi diseminasi informasi publik yang akurat, cepat, dan transparan. Semua fokus ini dirancang untuk mencapai indikator kinerja yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja ini tidak lepas dari dukungan dan kerja sama dari berbagai pihak, baik internal maupun eksternal. Oleh karena itu, kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan dokumen ini.

Besar harapan kami, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini dapat menjadi acuan yang efektif dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, demi terwujudnya Kabupaten Kediri yang semakin maju dan inovatif melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi yang optimal.

Kediri,

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI dan INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



NUR MIFTAHUL FUAD

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR ..... **i**

DAFTAR ISI ..... **ii**

BAB I PENDAHULUAN **1**

1.1 Latar Belakang **1**

1.2 Landasan Hukum **7**

1.3 Maksud dan Tujuan **12**

1.4 Sistematika Penulisan **13**

BAB II HASIL EVALUASI PELAKSANAAN RENCANA KERJA (RENJA) DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI TAHUN 2026 ..... **18**

2.1 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri **18**

2.2 Analisis Pencapaian Target/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun Sebelumnya **32**

2.3 Analisis Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah **42**

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah **55**

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD **62**

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat **81**

BAB III TUJUAN DAN SASARAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan terhadap Kebijakan Nasional **82**

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja (RENJA) Perangkat Daerah **84**

3.3 Program dan Kegiatan **88**

BAB IV RENCANA KERJA (RENJA) DAN PENDANAAN DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KABUPATEN KEDIRI **102**

BAB V PENUTUP **107**

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2026 adalah dokumen strategis yang fundamental, merinci secara komprehensif seluruh program, kegiatan, serta target kinerja yang akan dicapai oleh Diskominfo Kabupaten Kediri selama satu tahun anggaran ke depan. Dokumen ini bukan sekadar daftar rencana, melainkan pedoman operasional utama yang mengikat bagi setiap jajaran dan unit kerja di lingkungan Diskominfo. Ini akan memandu secara sistematis pelaksanaan tugas dan fungsi Diskominfo di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Dengan penekanan khusus pada tahun 2026 sebagai periode krusial dan penentu dalam pencapaian target-target pembangunan daerah jangka menengah, Renja ini dirancang secara cermat untuk secara proaktif mendukung terwujudnya Visi Kabupaten Kediri yang maju, inovatif, dan berdaya saing. Ini akan dicapai melalui optimalisasi pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi secara menyeluruh, sekaligus memastikan ketersediaan informasi yang akurat, terpercaya, dan dapat diakses luas oleh seluruh lapisan masyarakat. Secara spesifik, Renja Dinas Kominfo adalah dokumen perencanaan tahunan yang memuat program, kegiatan, dan target kinerja Diskominfo untuk satu tahun anggaran ke depan. Dokumen ini menjadi pedoman operasional utama bagi seluruh jajaran Diskominfo dalam melaksanakan tugas dan fungsi di bidang komunikasi, informatika, persandian, dan statistik. Renja ini disusun dengan mempertimbangkan Visi dan Misi Kepala Daerah (misalnya, Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri 2025-2029), Rencana Strategis (Renstra) Diskominfo tahun 2025-2029 yang merupakan penjabaran dari visi dan misi kepala daerah ke dalam lingkup Diskominfo, Kondisi eksisting (kondisi riil) dan tantangan yang dihadapi di lapangan, Capaian kinerja tahun sebelumnya sebagai dasar evaluasi, Peraturan perundang-undangan yang relevan, seperti regulasi tentang perencanaan pembangunan daerah dan pengelolaan keuangan. Renja Dinas Kominfo berfungsi sebagai instrumen kunci untuk memastikan bahwa setiap langkah dan inisiatif Diskominfo selaras dengan tujuan pembangunan daerah, berjalan transparan dan akuntabel, serta berkontribusi pada peningkatan kualitas pelayanan publik melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Penyusunan Rencana Kerja ini didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat dan terintegrasi. Referensi utama meliputi: Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2023 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2024, yang menggarisbawahi pentingnya efisiensi dan efektivitas dalam pengelolaan anggaran. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang menjadi landasan untuk memastikan seluruh program dan kegiatan berjalan dalam koridor tata kelola pemerintahan yang baik. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, beserta perubahannya yaitu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 3 Tahun 2024. Regulasi ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang direncanakan Diskominfo terklasifikasi, terkodefikasi, dan ternomenklatur secara seragam, komprehensif, dan akuntabel sesuai standar pemerintah pusat. Hal ini krusial untuk menciptakan transparansi, kemudahan evaluasi kinerja, dan menekan potensi tumpang tindih program.

Berdasarkan Keselarasan dengan Visi Pembangunan Daerah, dapat dijelaskan bahwa Konteks utama penyusunan Rencana Kerja 2026 ini adalah adanya Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025-2029. Renstra ini mengemban dan menerjemahkan secara spesifik Visi Bupati dan Wakil Bupati Kediri Tahun 2025-2029: “Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan”. Dalam mencapai Visi tersebut, Diskominfo Kabupaten Kediri mengemban Misi ke-3: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan. Misi ini sangat selaras dengan semboyan "Kabupaten Kediri Maju", yang menekankan pada kemajuan dan inovasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Lebih lanjut, Diskominfo Kabupaten Kediri memiliki Tujuan 3: Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Keberhasilan tujuan ini akan terukur melalui Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kediri, Indeks Kepuasan Pengguna (IKP), dan Indeks Kinerja Kelembagaan (IKK) yang secara spesifik dimandatkan kepada Diskominfo Kabupaten Kediri. Rencana Kerja 2026 ini

menjadi jembatan operasional untuk mencapai target-target Rencana Strategis tersebut dalam satu tahun anggaran.

Dengan melihat kondisi ideal yang diharapkan, Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2026 merupakan gambaran cita-cita untuk mewujudkan Kabupaten Kediri sebagai daerah yang terdepan dalam pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) untuk pelayanan publik yang inovatif dan partisipasi masyarakat yang aktif. Kondisi ideal yang ingin dicapai pada tahun 2026, selaras dengan Visi Bupati dan Wakil Bupati serta Renstra Diskominfo 2025-2029, meliputi:

1) Peningkatan Kualitas dan Keterjangkauan Infrastruktur TIK:
   Seluruh area strategis dan pelayanan publik di Kabupaten Kediri akan terhubung dengan infrastruktur jaringan yang memadai dan andal. Akses internet cepat dan merata akan menjadi kenyataan, meminimalkan kesenjangan digital antar wilayah, dari pusat kota hingga pelosok desa. Ini termasuk tersedianya pusat data yang aman dan handal untuk mendukung seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik (SPBE).
2) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan Digital (SPBE) yang Optimal:
   Indeks SPBE Kabupaten Kediri akan meningkat secara signifikan, menunjukkan efisiensi, transparansi, dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan pemerintahan. Seluruh layanan internal dan eksternal pemerintah daerah akan terintegrasi dalam satu platform digital, mengurangi birokrasi, dan memudahkan interaksi masyarakat. Penggunaan data dan informasi akan menjadi dasar pengambilan kebijakan yang lebih akurat dan tepat sasaran.
3) Masyarakat Kabupaten Kediri yang Berdaya dan Melek Digital:
   Literasi digital masyarakat akan meningkat pesat, memungkinkan mereka untuk memanfaatkan teknologi secara produktif, aman, dan bertanggung jawab. Partisipasi publik dalam pembangunan daerah akan terfasilitasi melalui platform digital, menciptakan ruang dialog yang konstruktif antara pemerintah dan warga. Masyarakat akan lebih mudah mengakses informasi publik yang akurat dan relevan.
4) Ekosistem Keamanan Siber yang Kuat dan Terpercaya:
   Seluruh data dan sistem informasi pemerintahan daerah akan terlindungi secara optimal dari berbagai ancaman siber. Diskominfo akan menjadi garda terdepan dalam membangun kesadaran keamanan siber di

lingkungan pemerintah dan masyarakat, memastikan ekosistem digital yang aman dan kondusif untuk bertransaksi dan berinteraksi.

5) Pelayanan Informasi Publik yang Cepat, Akurat, dan Inklusif:
Masyarakat akan merasakan kemudahan dalam mendapatkan informasi publik yang dibutuhkan. Mekanisme penyebarluasan informasi akan lebih beragam dan menjangkau seluruh lapisan masyarakat, termasuk kelompok rentan, melalui berbagai kanal komunikasi yang adaptif dan inovatif. Diskominfo akan menjadi simpul informasi terpercaya bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

Dengan tercapainya kondisi-kondisi ini, Diskominfo Kabupaten Kediri optimis dapat memberikan kontribusi nyata terhadap terwujudnya Kabupaten Kediri yang "Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" melalui transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan. Meskipun Diskominfo Kabupaten Kediri memiliki cita-cita yang ambisius untuk mewujudkan transformasi digital, kondisi riil di lapangan masih menunjukkan sejumlah tantangan dan kesenjangan signifikan dibandingkan dengan kondisi ideal yang diharapkan:

1. Infrastruktur TIK yang Belum Merata dan Optimal
    a. Kesenjangan Akses Internet: Akses internet cepat dan stabil masih terpusat di wilayah perkotaan atau area strategis tertentu. Banyak wilayah pedesaan dan pelosok desa di Kabupaten Kediri masih menghadapi kendala akses internet yang terbatas, lambat, atau bahkan belum tersedia sama sekali, menciptakan kesenjangan digital yang signifikan.
    b. Kualitas Jaringan: Meskipun beberapa area terhubung, kualitas jaringan seringkali belum memadai atau tidak stabil untuk mendukung operasional SPBE yang kompleks dan transaksi digital bervolume tinggi.
    c. Pusat Data dan Keandalan Sistem: Kapasitas dan keandalan pusat data yang ada belum sepenuhnya optimal untuk menopang seluruh sistem pemerintahan berbasis elektronik yang terintegrasi. Masih terdapat keterbatasan dalam redundansi, keamanan fisik, dan kapasitas penyimpanan yang memadai untuk pertumbuhan data di masa mendatang.

2. Tata Kelola Pemerintahan Digital (SPBE) yang Belum Sepenuhnya Terintegrasi
    a. Fragmentasi Sistem Aplikasi: Banyak layanan internal dan eksternal pemerintah daerah masih berjalan secara parsial atau pada sistem aplikasi yang terpisah-pisah (silo). Hal ini menyebabkan kurangnya integrasi data dan proses bisnis antar-OPD, sehingga menciptakan birokrasi yang rumit dan memerlukan entri data berulang.
    b. Rendahnya Pemanfaatan Data: Penggunaan data dan informasi sebagai dasar pengambilan kebijakan belum sepenuhnya optimal. Seringkali, keputusan masih lebih banyak didasarkan pada pengalaman atau intuisi daripada analisis data yang komprehensif, karena keterbatasan sistem integrasi dan tools analisis.
    c. Tantangan Interoperabilitas: Terdapat masalah interoperabilitas antar sistem yang berbeda, menyulitkan pertukaran data secara otomatis dan efisien, sehingga menghambat peningkatan Indeks SPBE secara signifikan.
3. Tingkat Literasi dan Partisipasi Digital Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan
    a. Literasi Digital yang Bervariasi: Tingkat literasi digital masyarakat Kabupaten Kediri masih sangat bervariasi, dengan sebagian besar masih berada pada level dasar atau bahkan rendah, terutama di kelompok usia lanjut dan masyarakat di pedesaan. Banyak yang belum sepenuhnya memahami potensi produktif dan risiko keamanan dalam menggunakan teknologi.
    b. Partisipasi Publik Pasif: Meskipun ada platform digital, partisipasi publik dalam dialog dan pembangunan daerah melalui kanal digital masih cenderung pasif. Masyarakat kurang terbiasa atau belum sepenuhnya percaya untuk menyampaikan aspirasi atau berinteraksi secara aktif melalui platform yang disediakan.
    c. Akses Informasi yang Terbatas: Masyarakat masih mengalami kesulitan dalam mengakses informasi publik yang akurat dan relevan, karena mungkin saluran informasi belum menjangkau semua lapisan, atau format informasi masih kurang mudah dipahami oleh semua kalangan.

4. Ekosistem Keamanan Siber yang Rentan

a. Kerentanan Sistem: Data dan sistem informasi pemerintahan daerah masih memiliki kerentanan terhadap berbagai ancaman siber, seperti serangan malware, phishing, atau peretasan. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sumber daya manusia yang mumpuni, penerapan standar keamanan yang belum konsisten, dan kurangnya investasi pada teknologi keamanan siber terbaru.

b. Rendahnya Kesadaran Keamanan: Tingkat kesadaran keamanan siber di lingkungan pemerintah dan masyarakat masih relatif rendah. Banyak pegawai dan masyarakat yang belum sepenuhnya memahami praktik-praktik dasar keamanan siber, sehingga rentan menjadi target kejahatan siber.

5. Pelayanan Informasi Publik yang Belum Sepenuhnya Cepat dan Inklusif

a. Keterbatasan Kanal Informasi: Mekanisme penyebarluasan informasi publik belum sepenuhnya beragam dan inklusif. Beberapa kelompok masyarakat, terutama di daerah terpencil atau kelompok rentan (disabilitas, lansia), masih sulit mendapatkan informasi yang relevan karena keterbatasan akses atau format yang tidak sesuai.

b. Kecepatan dan Akurasi: Meskipun ada upaya, kecepatan penyampaian informasi publik belum selalu optimal, terutama dalam situasi darurat. Terkadang, akurasi informasi juga masih menjadi tantangan karena belum adanya sistem verifikasi yang terpusat dan efisien.

Menurut Penyusunan Evaluasi Kinerja Tahun Sebelumnya (2025), Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini merupakan sebuah keniscayaan yang dilandasi oleh dinamika perkembangan teknologi informasi dan komunikasi yang pesat, serta kebutuhan adaptasi terhadap capaian dan tantangan yang dihadapi pada tahun sebelumnya. Evaluasi menyeluruh terhadap kinerja Diskominfo Kabupaten Kediri pada tahun 2025 menunjukkan adanya kemajuan signifikan dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, namun juga mengidentifikasi area-area yang memerlukan penyesuaian strategi dan program di tahun mendatang.

Sebagai gambaran, pada tahun 2025, Diskominfo Kabupaten Kediri berhasil menunjukkan transformasi digital dalam penyelenggaraan pelayanan

publik. Hal ini terbukti dengan peningkatan Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). Target Indeks SPBE tahun 2025 sebesar 4,52 berhasil dilampaui dengan realisasi mencapai 4,62. Capaian ini menunjukkan komitmen dan efektivitas Diskominfo dalam mendorong digitalisasi layanan pemerintahan di Kabupaten Kediri.

Selain itu, Diskominfo juga berhasil meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Indikator keberhasilan ini tercermin dari peningkatan Indeks Kategori Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Target Indeks Kategori PPID tahun 2025 sebesar 84,6 berhasil dicapai dengan realisasi yang jauh melampaui target, yaitu mencapai 95,91. Angka ini merefleksikan upaya berkelanjutan dalam memastikan keterbukaan informasi dan kemudahan akses bagi masyarakat. Dari sisi pengelolaan anggaran, Diskominfo Kabupaten Kediri menunjukkan kinerja yang optimal dengan tingkat penyerapan anggaran tahun 2025 sebesar 91,54%. Tingginya persentase penyerapan ini menandakan efisiensi dan efektivitas dalam pemanfaatan sumber daya keuangan untuk mendukung berbagai program dan kegiatan.

Meskipun capaian tahun 2025 menunjukkan hasil yang sangat positif, Diskominfo Kabupaten Kediri tetap perlu melakukan penyesuaian rencana kerja untuk tahun 2026. Perubahan ini didasari oleh beberapa faktor, antara lain: evolusi teknologi yang terus berjalan, kebutuhan untuk mengoptimalkan potensi digitalisasi lebih lanjut, serta tuntutan masyarakat akan pelayanan publik yang semakin transparan, responsif, dan mudah diakses. Oleh karena itu, Rencana Kerja Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun untuk mengantisipasi dinamika tersebut, memperkuat capaian yang telah diraih, dan menjawab tantangan-tantangan baru demi mewujudkan pelayanan publik yang lebih prima di era digital.

1.2 LANDASAN HUKUM

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2026 didasarkan pada kerangka regulasi yang kuat dan terkini. Landasan hukum ini memastikan bahwa perencanaan yang kami susun terintegrasi secara komprehensif, akuntabel, dan selaras dengan kebijakan pembangunan nasional maupun daerah. Beberapa peraturan perundang-undangan utama yang menjadi pijakan dalam penyusunan Rencana Kerja ini meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2025-2045;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2017 tentang Sinkronisasi Proses Perencanaan dan Penganggaran Pembangunan Nasional;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pedoman Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
16. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
17. Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub-urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan;
25. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Kesehatan;

26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 10 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2026;
27. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
29. Peraturan Menteri PAN RB No. 09 tahun 2023 tentang Evaluasi Reformasi
    Birokrasi;
30. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 10 Tahun 2019 tentang Pelaksanaan Persandian untuk Pengamanan Informasi di Pemerintah Daerah;
31. Peraturan Badan Siber Dan Sandi Negara Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2024 Tentang Rencana Aksi Nasional Keamanan Siber Tahun 2024-2028;
32. Peraturan Kepala Lembaga Sandi Negara Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi Di Lingkungan Pemerintahan Daerah Provinsi Dan Kabupaten/Kota;
33. Peraturan Badan Siber dan Sandi Negara Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik dan Standar Teknis dan Prosedur Keamanan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik;
34. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2026);
35. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 4 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri;
36. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 10 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2023 Nomor 6);

37. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 5 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2024 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 127);
38. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025-2045;
39. Peraturan Bupati Kediri Nomor 25 Tahun 2025 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Kabupaten Kediri Tahun 2025.
40. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Kediri (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2016 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 147);
41. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 6 Tahun 2023 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Kediri Tahun 2023-2043 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Nomor 182);
42. Peraturan Daerah Kabupaten Kediri Nomor 9 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2025–2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2024 Nomor 9);
43. Peraturan Bupati Kediri Nomor 31 Tahun 2022 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Uraian Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri.

Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 didasarkan pada kerangka hukum yang kokoh, memastikan setiap program dan kegiatan yang direncanakan selaras dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Landasan hukum ini tidak hanya memberikan legitimasi, tetapi juga menjadi panduan utama dalam perumusan kebijakan, alokasi sumber daya, dan implementasi program kerja yang efektif dan efisien. Dengan berpegang teguh pada landasan hukum tersebut, Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2025 diharapkan dapat menjadi instrumen perencanaan yang akuntabel, transparan, dan responsif terhadap dinamika kebutuhan masyarakat serta tuntutan pembangunan daerah. Hal ini krusial untuk memastikan bahwa setiap inisiatif dan program yang dijalankan tidak hanya relevan, tetapi juga memiliki dasar

hukum yang kuat, meminimalisir risiko hukum, dan menjamin keberlanjutan pembangunan di bidang komunikasi dan informatika demi mewujudkan Visi Kabupaten Kediri yang lebih maju dan inovatif.

1.3 MAKSUD DAN TUJUAN

Penyusunan rencana kerja tahun 2026 adalah proses krusial bagi setiap organisasi, baik swasta maupun pemerintah, untuk memastikan arah yang jelas dan pencapaian tujuan yang efektif. Secara umum, maksud dan tujuannya dapat dirangkum sebagai berikut:

1. Maksud Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2026

   Maksud utama dari penyusunan rencana kerja adalah sebagai pedoman dan arah strategis bagi seluruh elemen organisasi. Ini mencakup:

   1) Penerjemahan Visi dan Misi: Menerjemahkan visi jangka panjang dan misi organisasi ke dalam target-target operasional yang spesifik dan terukur untuk tahun 2026.
   2) Alokasi Sumber Daya: Memberikan dasar untuk alokasi sumber daya (anggaran, SDM, peralatan) secara efisien dan efektif sesuai prioritas yang telah ditetapkan.
   3) Koordinasi dan Sinkronisasi: Memastikan semua departemen atau unit kerja memiliki pemahaman yang sama tentang tujuan dan peran masing-masing, sehingga dapat bekerja secara terkoordinasi dan sinergis.
   4) Pengukuran Kinerja: Menyediakan tolok ukur yang jelas untuk memantau dan mengevaluasi kinerja organisasi sepanjang tahun 2026.

2. Tujuan Penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2026

   Penyusunan rencana kerja memiliki beberapa tujuan spesifik yang ingin dicapai, antara lain:

   1) Mencapai Target dan Sasaran: Memastikan bahwa organisasi memiliki peta jalan yang jelas untuk mencapai target dan sasaran yang telah ditetapkan untuk tahun 2026, baik itu target finansial, operasional, kepuasan pelanggan, atau pengembangan SDM.
   2) Meningkatkan Efisiensi dan Efektivitas: Dengan perencanaan yang matang, organisasi dapat mengidentifikasi proses yang

tidak efisien dan mencari cara untuk memperbaikinya, sehingga penggunaan sumber daya menjadi lebih efektif dan hasil yang dicapai lebih optimal.

3) Mengantisipasi dan Mengelola Risiko: Rencana kerja memungkinkan organisasi untuk mengidentifikasi potensi risiko dan tantangan yang mungkin muncul di tahun 2026, serta merumuskan strategi mitigasi untuk menghadapinya.
4) Mendorong Akuntabilitas: Dengan adanya target dan tanggung jawab yang jelas, setiap individu atau unit kerja akan lebih akuntabel terhadap kinerja dan pencapaiannya.
5) Dasar Pengambilan Keputusan: Rencana kerja menjadi referensi utama dalam setiap pengambilan keputusan strategis maupun operasional sepanjang tahun 2026.
6) Komunikasi Internal dan Eksternal: Menyediakan dokumen formal yang dapat dikomunikasikan kepada seluruh pemangku kepentingan, baik internal (karyawan, manajemen) maupun eksternal (investor, mitra, masyarakat), mengenai arah dan prioritas organisasi.

Secara keseluruhan, penyusunan rencana kerja tahun 2026 bertujuan untuk menciptakan sebuah kerangka kerja yang komprehensif dan terstruktur, yang memandu organisasi menuju pencapaian tujuan strategisnya dengan lebih terarah, efisien, dan terukur.

1.4 SISTEMATIKA PENULISAN

Rencana Kerja (Renja) Tahun 2026 merupakan dokumen perencanaan operasional tahunan yang menjabarkan target, program, kegiatan, dan anggaran untuk mencapai tujuan strategis organisasi. Sistematika penyusunannya umumnya mengikuti struktur sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Bab ini berfungsi sebagai pengantar yang memberikan gambaran umum mengenai Rencana Kerja yang akan disusun.

1.1. Latar Belakang: Menjelaskan mengapa Rencana Kerja ini perlu disusun, kondisi eksisting yang melandasi, serta relevansinya dengan visi, misi, dan rencana strategis jangka panjang organisasi (misal: Rencana Strategis 5 tahunan). Bisa juga menyinggung evaluasi kinerja tahun sebelumnya (2025) sebagai dasar perbaikan.

1.2. Dasar Hukum/Acuan: Memuat peraturan perundang-undangan atau kebijakan internal yang menjadi landasan penyusunan Rencana Kerja (misal: UU Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, Peraturan Menteri/Kepala Daerah, SK Direksi, dll.).

1.3. Maksud dan Tujuan: Menjelaskan secara singkat maksud (untuk apa dokumen ini dibuat) dan tujuan (apa yang ingin dicapai melalui dokumen ini) penyusunan Rencana Kerja Tahun 2026.

1.4. Sistematika Penulisan: Menjelaskan struktur atau susunan bab-bab dalam dokumen Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB II: EVALUASI KINERJA TAHUN SEBELUMNYA (TAHUN 2025)

Bab ini merupakan analisis retrospektif terhadap capaian dan kendala di tahun sebelumnya sebagai bahan masukan untuk perencanaan tahun 2026.

2.1 Capaian Kinerja Tahun 2025:

- Evaluasi pencapaian target/indikator kinerja utama (IKU) tahun 2025 (output, outcome, bahkan impact jika memungkinkan).
- Analisis keberhasilan program/kegiatan yang telah dilaksanakan.
- Pembahasan mengenai alokasi dan realisasi anggaran tahun 2025.

2.2 Permasalahan dan Kendala:

- Identifikasi faktor-faktor penghambat (internal dan eksternal) yang menyebabkan tidak tercapainya target atau pelaksanaan kegiatan yang kurang optimal di tahun 2025.

2.3 Analisis akar permasalahan.

- Pembelajaran dan Rekomendasi:

  Sari pati pembelajaran dari keberhasilan dan kegagalan tahun 2025.

  Rekomendasi untuk perbaikan dan strategi adaptasi dalam Rencana Kerja Tahun 2026.

BAB III: ISU-ISU STRATEGIS DAN TARGET KINERJA TAHUN 2026

Bab ini fokus pada penetapan arah dan target yang ingin dicapai di tahun 2026.

3.1 Kondisi Umum/Lingkungan Strategis:

Analisis lingkungan eksternal (ekonomi, sosial, politik, teknologi, lingkungan) yang berpotensi memengaruhi organisasi di tahun 2026 (misal: kondisi inflasi, regulasi baru, tren pasar).

Analisis internal (kekuatan, kelemahan) organisasi terkait sumber daya dan kapabilitas.

Biasanya menggunakan analisis SWOT (Strengths, Weaknesses, Opportunities, Threats) atau PESTEL (Political, Economic, Social, Technological, Environmental, Legal).

3.2 Isu-Isu Strategis Tahun 2026:

Perumusan isu-isu kunci atau tantangan utama yang harus menjadi fokus perhatian organisasi di tahun 2026 berdasarkan analisis sebelumnya Isu ini harus relevan dengan visi, misi, dan tujuan strategis organisasi.

3.3 Tujuan dan Sasaran Tahun 2026:

Tujuan: Pernyataan umum tentang apa yang ingin dicapai di tahun 2026 (umumnya lebih dari 1 tahun).

Sasaran: Penjabaran tujuan yang lebih spesifik, terukur (SMART: Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound), dapat dicapai, relevan, dan memiliki batas waktu (untuk tahun 2026). Setiap sasaran harus memiliki indikator kinerja.

BAB IV: RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN TAHUN 2026

Bab inti yang menjabarkan detail program dan kegiatan untuk mencapai sasaran.

4.1 Program Tahunan 2026:

Penjelasan tentang program-program utama yang akan dilaksanakan untuk mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Program adalah kumpulan kegiatan yang sistematis.

Setiap program harus memiliki indikator kinerja program yang jelas.

4.2 Kegiatan Tahun 2026:

- Rincian kegiatan yang akan dilaksanakan di bawah setiap program.
- Untuk setiap kegiatan, harus dijelaskan:
- Nama Kegiatan: Nama spesifik kegiatan.
- Indikator Keluaran (Output): Hasil langsung dari pelaksanaan kegiatan.
- Target: Jumlah/volume output yang ingin dicapai.
- Lokasi: Tempat pelaksanaan kegiatan.
- Waktu Pelaksanaan: Jadwal pelaksanaan kegiatan (bulan/kuartal).
- Penanggung Jawab: Unit kerja atau individu yang bertanggung jawab.
- Kebutuhan Anggaran: Estimasi biaya yang diperlukan untuk melaksanakan kegiatan.

4.3 Matriks Rencana Program dan Kegiatan:

Penyajian tabular yang merangkum semua program, kegiatan, indikator, target, penanggung jawab, dan anggaran. Ini memudahkan pembacaan dan pemantauan.

BAB V: RENCANA ANGGARAN TAHUN 2026

Bab ini merinci kebutuhan finansial untuk melaksanakan Rencana Kerja.

5.1 Sumber Pendanaan: Menjelaskan dari mana sumber dana akan berasal (misal: APBN/APBD, pendapatan asli, investasi, pinjaman, dana hibah, dll.).

5.2 Rekapitulasi Anggaran: Ringkasan total anggaran yang dibutuhkan perprogram, per unit kerja, atau per jenis belanja (belanja pegawai, belanja barang, belanja modal).

5.3 Proyeksi Anggaran per Kegiatan: Rincian estimasi biaya untuk setiap kegiatan yang telah direncanakan di Bab IV.

BAB VI: MEKANISME PEMANTAUAN, EVALUASI, DAN PELAPORAN

Bab ini menjelaskan bagaimana Rencana Kerja akan dipantau dan dievaluasi.

6.1 Mekanisme Pemantauan:

Menjelaskan bagaimana progres pelaksanaan program dan kegiatan akan dipantau secara berkala (misal: rapat koordinasi bulanan, laporan progres). Siapa yang bertanggung jawab untuk pemantauan.

6.2 Mekanisme Evaluasi:

Menjelaskan bagaimana kinerja akan dievaluasi (misal: evaluasi triwulanan, evaluasi semesteran, evaluasi akhir tahun). Indikator apa yang akan digunakan untuk evaluasi (output, outcome). Pihak mana yang akan melakukan evaluasi.

6.3 Mekanisme Pelaporan:

Menjelaskan jenis laporan (laporan bulanan, triwulanan, semesteran, tahunan), format laporan, dan jadwal penyampaian laporan.

Alur pelaporan dan kepada siapa laporan disampaikan.

BAB VII: PENUTUP

Bab terakhir yang berisi kesimpulan dan harapan.

7.1 Kesimpulan: Merangkum poin-poin penting dari Rencana Kerja.

7.2 Harapan: Menyampaikan harapan terhadap keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 dan dampaknya terhadap pencapaian tujuan organisasi secara keseluruhan.

LAMPIRAN

Bagian ini berisi data pendukung yang tidak dimasukkan dalam tubuh utama dokumen, tetapi relevan dan mendukung Rencana Kerja.

- Struktur organisasi.
- Anggaran detail per akun belanja.

BAB II
EVALUASI KINERJA RENCANA KERJA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TAHUN SEBELUMNYA

2.1 Analisis Capaian Kinerja Pelayanan Dinas Komunikasi Dan Informatika Kabupaten Kediri

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan dan informatif, serta memfasilitasi akses informasi bagi masyarakat. Analisis capaian kinerja pelayanan ini bertujuan untuk mengevaluasi sejauh mana Diskominfo Kabupaten Kediri telah berhasil menjalankan tugas dan fungsinya dalam menyediakan layanan publik yang optimal. Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memegang peran krusial dalam mengakselerasi transformasi digital penyelenggaraan pelayanan publik di Kabupaten Kediri. Upaya ini sejalan dengan visi pemerintah daerah untuk menciptakan tata kelola pemerintahan yang efektif, efisien, transparan, dan akuntabel melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri berkomitmen penuh untuk mewujudkan pelayanan publik yang prima dan inovatif dalam periode **Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029**. Pencapaian kinerja kami akan terukur melalui lima sasaran strategis utama, yang didukung oleh indikator kinerja kunci (IKK) yang jelas dan terukur.

1. **Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Pemerintah Daerah**

   Sasaran pertama kami adalah meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan. Ini adalah fondasi bagi pengambilan kebijakan yang akurat dan berbasis bukti. Pencapaian ini akan kami ukur melalui Indeks Pembangunan Statistik. Semakin tinggi indeks ini, menunjukkan semakin baiknya ketersediaan, kualitas, dan pemanfaatan data statistik di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri. Kami akan fokus pada pengumpulan, pengolahan, dan penyajian data yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh seluruh pemangku kepentingan.

2. **Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik**

   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri berupaya meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik

dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital. Di era digital ini, akses informasi yang cepat dan transparan adalah kunci. Indikator keberhasilan untuk sasaran ini adalah Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Peningkatan indeks ini akan mencerminkan efektivitas Diskominfo dalam menyediakan informasi publik yang transparan, akuntabel, dan mudah dijangkau masyarakat melalui berbagai platform digital, serta mendorong inovasi dalam penyampaian informasi.

3. **Peningkatan Implementasi Standar Keamanan Siber**

   Keamanan siber adalah prioritas utama. Oleh karena itu, sasaran ketiga kami adalah meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah. Keamanan data dan sistem adalah krusial untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan layanan. Indeks KAMI (Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur) akan menjadi tolok ukur utama. Dengan meningkatnya indeks ini, kami memastikan bahwa seluruh sistem dan infrastruktur TIK pemerintah daerah terlindungi dari berbagai ancaman siber, meminimalkan risiko kebocoran data dan gangguan layanan.

4. **Peningkatan Integrasi Layanan dan Digitalisasi Pemerintah Daerah**

   Kami juga menargetkan peningkatan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah yang terpadu, terpersonalisasi, dan *user-centric*. Ini berarti menciptakan pengalaman pelayanan yang mulus dan mudah bagi masyarakat. Indeks Teknologi Digital SPBE (Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik) dan Pemerintah Digital akan menjadi indikator kunci untuk sasaran ini. Peningkatan indeks ini akan menunjukkan sejauh mana pemerintah daerah telah berhasil mengintegrasikan berbagai layanan, memangkas birokrasi, dan menyediakan layanan digital yang intuitif serta sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

5. **Peningkatan Tingkat Kepuasan Masyarakat**

   Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri berkomitmen untuk meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik. Sasaran ini adalah cerminan langsung dari keberhasilan seluruh upaya kami. Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (SKM) akan menjadi alat ukur utama. Kami akan secara berkala melakukan survei untuk mengukur persepsi dan kepuasan masyarakat terhadap layanan yang kami sediakan, dan hasil survei ini

akan menjadi masukan berharga untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan Diskominfo Kabupaten Kediri.

Melalui komitmen terhadap sasaran dan indikator kinerja kunci ini Diskominfo Kabupaten Kediri optimis dapat memberikan kontribusi nyata dalam mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, inovatif, dan melayani masyarakat dengan sepenuh hati. Capaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri adalah sebagai berikut:

Pencapaian Kinerja Pelayanan Satuan Kerja Perangkat Daerah Dinas Komunikasi dan Informatika

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

NO	INDIKATOR	SPM/STANDAR NASIONAL	IKK	TARGET RENSTRA SKPD				Realisasi Capaian				Catatan Analisis
				Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	Tahun 2022	Tahun 2023	Tahun 2024	Tahun 2025	
1	Sasaran Rencana Strategis (RENSTRA) Tahun 2025-2029 Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri: Meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah yang relevan	1. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI), Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2019 tentang Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria Penyelenggaraan Statistik Sektoral oleh Pemerintah Daerah. 2. Peraturan BPS Nomor 4 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Standar Data	Indeks Pembangunan Statistik (Indikator Sasaran)	1,15	1,20	1,30	2,62	1,50	1,30	2,62	-	

		Statistik. 3. Peraturan BPS Nomor 5 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Metadata Statistik. 4. Peraturan BPS Nomor 3 Tahun 2022 tentang Evaluasi Penyelenggaraan Statistik Sektoral.										
2	Meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik dengan pemanfaatan teknologi untuk inovasi melalui berbagai kanal digital	Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (KIP)	Indeks PPID (Indikator Sasaran)	6,60	12	84,55	95,94	12	84,53	95,91	-	
3	Meningkatkan implementasi standar keamanan siber pada seluruh sistem informasi dan infrastruktur TIK pemerintah daerah	1. Peraturan BSSN Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Manajemen Keamanan Informasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik.	Indeks KAMI (Indikator Sasaran)	325	330	340	400	315	320	341	-	

		Ini adalah dokumen paling krusial. Peraturan ini mengacu pada Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 27001:2013 tentang Sistem Manajemen Keamanan Informasi (SMKI). 2. Standar Nasional Indonesia (SNI) ISO/IEC 27001:2013 (Sistem Manajemen Keamanan Informasi - SMKI).										
4	Meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah terpadu, terpersonalisasi, dan user centric	1. Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE). 2. Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun	Indek Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital (Indikator Sasaran)	1,00	1,20	1,30	1,50	1,50	4,00	4,25	-	

		2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional.										
5	Meningkatkan tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan informasi dan komunikasi publik	1. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63 Tahun 2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 2. PermenPANRB Nomor 29 Tahun 2022 tentang Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik (yang telah diubah dengan PermenPANRB Nomor 4 Tahun	Indeks Survei Kepuaan Masyarakat (Indikator Sasaran)	82	91	92,20	92,25	83,89	92,27	91,59	-	

		2023). 3. PermenPANRB Nomor 1 Tahun 2022 tentang Instrumen dan Mekanisme Pemantauan dan Evaluasi Kinerja Penyelenggaraan Pelayanan Publik. 4. PermenPANRB Nomor 24 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pengelolaan Pengaduan Pelayanan Publik Secara Nasional.										

Tabel 2.1

Berdasarkan Tabel 2.1, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah menunjukkan kinerja yang beragam dalam periode 2022-2024, menjelang dimulainya Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025-2029. Analisis berikut didasarkan pada data realisasi capaian dibandingkan dengan target Renstra yang ditetapkan.

1. Peningkatan Ketersediaan dan Kualitas Data Statistik Pemerintah Daerah
    - IKK: Indeks Pembangunan Statistik
    - Target Renstra (2022-2024): 1.15, 1.20, 1.30
    - Realisasi Capaian (2022-2024): 1.50, 1.30, 2.62

    Capaian pada indikator Indeks Pembangunan Statistik menunjukkan kinerja yang sangat positif dan melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi mencapai 1.50 jauh di atas target 1.15. Meskipun sedikit menurun di tahun 2023 menjadi 1.30 (masih di atas target), terjadi lonjakan signifikan pada tahun 2024 dengan realisasi 2.62, hampir dua kali lipat dari target 1.30. Ini mengindikasikan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri telah berhasil meningkatkan ketersediaan dan kualitas data statistik pemerintah daerah secara konsisten dan bahkan melebihi ekspektasi. Capaian ini menjadi modal kuat untuk mencapai target yang lebih ambisius di tahun 2025 (target 2.62) dan seterusnya.
2. Peningkatan Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik
    - IKK: Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)
    - Target Renstra (2022-2024): 6.60, 12, 84.55
    - Realisasi Capaian (2022-2024): 12, 84.53, 95.91

    Kinerja pada indikator Indeks PPID juga menunjukkan peningkatan yang sangat baik dan konsisten melampaui atau mendekati target. Pada tahun 2022, realisasi 12 melampaui target 6.60. Tahun 2023 menunjukkan lonjakan drastis realisasi 84.53, yang sangat mendekati target 84.55. Peningkatan berlanjut di tahun 2024 dengan realisasi 95.91, yang juga sangat mendekati target 95.94. Ini mengindikasikan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri telah sangat efektif dalam meningkatkan pengelolaan informasi dan komunikasi publik, serta memanfaatkan teknologi digital untuk inovasi. Capaian ini menunjukkan komitmen kuat terhadap transparansi dan akses informasi publik.
3. Peningkatan Implementasi Standar Keamanan Siber
    - IKK: Indeks KAMI (Keamanan Aplikasi dan Infrastruktur)
    - Target Renstra (2022-2024): 325, 330, 340
    - Realisasi Capaian (2022-2024): 315, 320, 341

Pada indikator Indeks KAMI, realisasi menunjukkan tren peningkatan namun dengan beberapa variasi terhadap target. Pada tahun 2022, realisasi 315 sedikit di bawah target 325. Namun, terjadi peningkatan di tahun 2023 dengan realisasi 320, meskipun masih di bawah target 330. Patut dicatat bahwa di tahun 2024, realisasi 341 berhasil melampaui target 340. Ini menunjukkan adanya upaya berkelanjutan untuk meningkatkan implementasi standar keamanan siber, dan di tahun 2024 Diskominfo berhasil memenuhi bahkan sedikit melampaui target. Perlu terus menjaga momentum ini untuk mencapai target 400 di tahun 2025.

4. Peningkatan Integrasi Layanan dan Digitalisasi Pemerintah Daerah
   - IKK: Indeks Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital
   - Target Renstra (2022-2024): 1.00, 1.20, 1.30
   - Realisasi Capaian (2022-2024): 1.50, 4.00, 4.25

   Kinerja pada indikator Indeks Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital menunjukkan pencapaian yang luar biasa dan jauh melampaui target yang ditetapkan. Pada tahun 2022, realisasi 1.50 sudah melebihi target 1.00. Lonjakan signifikan terjadi di tahun 2023 dengan realisasi mencapai 4.00, jauh di atas target 1.20. Peningkatan terus berlanjut di tahun 2024 dengan realisasi 4.25, yang juga sangat jauh melampaui target 1.30. Ini menunjukkan Diskominfo Kabupaten Kediri telah berhasil secara signifikan dalam meningkatkan integrasi layanan dan digitalisasi pemerintah daerah, menciptakan fondasi yang kuat untuk pemerintah digital yang terpadu dan user-centric.

5. Peningkatan Tingkat Kepuasan Masyarakat
   - IKK: Indeks Survei Kepuasan Masyarakat (IKM)
   - Target Renstra (2022-2024): 82, 91, 92.20
   - Realisasi Capaian (2022-2024): 83.89, 92.27, 91.59

   Pada indikator Indeks Survei Kepuasan Masyarakat, Diskominfo Kabupaten Kediri menunjukkan kinerja yang sangat baik dalam mencapai dan melampaui target. Pada tahun 2022, realisasi 83.89 sedikit di atas target 82. Tahun 2023 menunjukkan peningkatan yang substansial dengan realisasi 92.27, melampaui target 91. Meskipun sedikit menurun di tahun 2024 menjadi 91.59, angka ini masih sangat mendekati target 92.20 dan tetap menunjukkan tingkat kepuasan masyarakat yang tinggi. Upaya untuk mempertahankan dan terus meningkatkan kepuasan masyarakat ini sangat penting untuk keberlanjutan layanan yang berkualitas.

Secara keseluruhan, Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri telah menunjukkan kinerja yang sangat impresif dalam periode 2022-2024 berdasarkan indikator kinerja kunci yang ditetapkan. Mayoritas indikator menunjukkan realisasi capaian yang konsisten melampaui atau mendekati target Renstra. Terutama pada Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital, capaiannya jauh melampaui ekspektasi. Indikator Indeks PPID dan Indeks Survei Kepuasan Masyarakat juga menunjukkan hasil yang sangat positif. Meskipun Indeks KAMI sempat sedikit di bawah target di awal periode, ada perbaikan signifikan di tahun 2024.

Pencapaian ini menunjukkan komitmen kuat dan efektivitas Diskominfo Kabupaten Kediri dalam mewujudkan sasaran-sasaran strategisnya, terutama dalam mendorong digitalisasi, transparansi informasi, dan peningkatan kualitas pelayanan publik. Fondasi yang kuat ini akan sangat mendukung keberhasilan pelaksanaan Renstra Tahun 2025-2029 dan mencapai target yang lebih ambisius ke depannya.

Pencapaian kinerja yang impresif oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri dalam periode 2022-2024, yang melampaui sebagian besar target Renstra, tidak lepas dari beberapa faktor pendorong utama. Faktor-faktor ini mencerminkan komitmen, strategi yang efektif, dan adaptasi terhadap perkembangan teknologi.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan, antara lain:

1. Komitmen Kuat Terhadap Digitalisasi dan Keterbukaan Informasi
    - Visi Pimpinan dan Staf: Adanya visi yang jelas dari pimpinan Diskominfo dan komitmen seluruh jajaran staf untuk mewujudkan pemerintahan digital dan transparan di Kabupaten Kediri menjadi pendorong utama. Hal ini tercermin dari capaian luar biasa pada Indeks Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital serta Indeks PPID.
    - Prioritas Kebijakan Daerah: Dukungan dari kebijakan pemerintah daerah yang memprioritaskan transformasi digital dan keterbukaan informasi turut mempercepat implementasi program-program Diskominfo.

2. Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia (SDM) dan Infrastruktur
    - Pengembangan Kompetensi Staf: Investasi dalam pelatihan dan pengembangan kapasitas SDM di bidang statistik, pengelolaan informasi, keamanan siber, dan teknologi digital sangat krusial. Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks KAMI menunjukkan adanya peningkatan keahlian dalam pengelolaan data dan pengamanan sistem.
    - Pengembangan Infrastruktur TIK: Adanya investasi dan pengembangan infrastruktur Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) yang memadai, termasuk jaringan, perangkat keras, dan perangkat lunak, menjadi fondasi bagi digitalisasi layanan dan pengelolaan data yang lebih baik.
3. Pemanfaatan Teknologi Inovatif dan Kolaborasi Efektif
    - Adopsi Teknologi Baru: Diskominfo proaktif dalam mengadopsi teknologi digital terbaru untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas layanan. Ini terlihat dari lonjakan signifikan pada Indeks Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital, menunjukkan penggunaan teknologi untuk menciptakan layanan yang terintegrasi dan user-centric.
    - Kerja Sama Lintas Sektor: Kolaborasi yang kuat dengan berbagai Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lain di lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri, serta dengan pihak eksternal, sangat penting dalam mengintegrasikan data dan layanan, seperti yang tercermin dalam peningkatan Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks Teknologi Digital SPBE.
4. Orientasi Pelayanan dan Responsivitas Terhadap Kebutuhan Masyarakat
    - Fokus pada Pengguna: Pendekatan user-centric dalam pengembangan layanan digital memastikan bahwa layanan yang disediakan relevan dan mudah digunakan

oleh masyarakat. Hal ini berkorelasi langsung dengan tingginya Indeks Survei Kepuasan Masyarakat.

- Mekanisme Umpan Balik: Implementasi mekanisme umpan balik yang efektif dari masyarakat, serta responsivitas Diskominfo dalam menanggapi masukan tersebut, turut mendorong peningkatan kualitas layanan dan kepuasan publik.
- Transparansi dan Aksesibilitas Informasi: Kemudahan akses terhadap informasi publik melalui berbagai kanal digital PPID telah membangun kepercayaan masyarakat dan meningkatkan partisipasi publik, yang juga berdampak pada Indeks Survei Kepuasan Masyarakat.

Dengan berlandaskan pada faktor-faktor pendorong ini, Diskominfo Kabupaten Kediri berhasil membangun momentum positif dalam transformasi digital dan peningkatan kualitas pelayanan. Keberhasilan ini menjadi fondasi yang kuat untuk mencapai target-target ambisius yang telah ditetapkan dalam Renstra 2025-2029.

b. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan, antara lain:

Meskipun capaiannya impresif, perjalanan transformasi digital tidak luput dari sejumlah tantangan yang menjadi faktor penghambat, dan ini perlu terus diwaspadai serta dicarikan solusinya:

1. Infrastruktur TIK yang Belum Merata dan Optimal:
    - Kesenjangan Akses Internet: Pemerataan akses internet cepat dan stabil masih menjadi kendala, terutama di wilayah pedesaan dan pelosok. Ini menciptakan kesenjangan digital yang menghambat akses masyarakat dan efektivitas layanan digital di seluruh wilayah.
    - Kualitas Jaringan dan Pusat Data: Meskipun ada peningkatan, kualitas jaringan di beberapa area belum sepenuhnya stabil untuk mendukung operasional SPBE yang kompleks. Selain itu, kapasitas dan keandalan pusat data yang ada belum sepenuhnya optimal untuk pertumbuhan data di masa depan.

2. Tata Kelola Pemerintahan Digital (SPBE) yang Belum Sepenuhnya Terintegrasi:
    - Fragmentasi Sistem Aplikasi: Masih banyak layanan internal dan eksternal yang berjalan pada sistem aplikasi terpisah (silo). Ini mengakibatkan kurangnya integrasi data dan proses bisnis antar-OPD, yang menciptakan birokrasi berulang dan menghambat efisiensi maksimal.
    - Tantangan Interoperabilitas: Sulitnya pertukaran data secara otomatis antar sistem yang berbeda menjadi penghambat signifikan dalam mencapai SPBE yang terpadu sepenuhnya.
3. Tingkat Literasi dan Partisipasi Digital Masyarakat yang Perlu Ditingkatkan:
    - Variasi Literasi Digital: Tingkat literasi digital masyarakat masih bervariasi, dengan sebagian besar di level dasar atau rendah, terutama di kelompok usia lanjut dan masyarakat pedesaan. Ini membatasi kemampuan mereka dalam memanfaatkan teknologi secara produktif dan aman.
    - Partisipasi Publik Pasif: Meskipun ada platform digital, partisipasi publik dalam dialog dan pembangunan daerah masih cenderung pasif, menunjukkan kurangnya kebiasaan atau kepercayaan untuk berinteraksi secara aktif.
4. Ekosistem Keamanan Siber yang Rentan:
    - Kerentanan Sistem dan Rendahnya Kesadaran: Data dan sistem informasi pemerintahan masih memiliki kerentanan terhadap ancaman siber karena kurangnya SDM mumpuni, standar keamanan yang belum konsisten, dan rendahnya kesadaran keamanan siber di kalangan pegawai maupun masyarakat.
5. Pelayanan Informasi Publik yang Belum Sepenuhnya Cepat dan Inklusif:
    - Keterbatasan Kanal dan Akurasi: Mekanisme penyebarluasan informasi publik belum sepenuhnya beragam dan inklusif untuk semua lapisan masyarakat,

termasuk kelompok rentan. Kecepatan dan akurasi informasi dalam kondisi tertentu juga masih menjadi tantangan.

Dengan memahami faktor pendorong dan penghambat ini, Diskominfo Kabupaten Kediri dapat menyusun strategi yang lebih tajam dan terfokus dalam Rencana Kerja 2026 dan Renstra 2025-2029 untuk memperkuat keberhasilan yang sudah dicapai dan secara proaktif mengatasi setiap tantangan yang ada, demi mewujudkan Kabupaten Kediri yang benar-benar "Maju" melalui transformasi digital.

2.2 Analisis Pencapaian Target/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun Sebelumnya

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki sasaran strategis yang jelas: "Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik." Sasaran ini krusial untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas pemerintah daerah, sekaligus memenuhi hak masyarakat atas informasi. Untuk mengukur keberhasilan sasaran ini, Diskominfo menggunakan tolok ukur spesifik, yaitu Indeks Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID). Berdasarkan Analisis Pencapaian Target/Indikator Kinerja Kunci (IKK) Tahun Sebelumnya adalah:

Indeks PPID merupakan Barometer Kualitas Pelayanan Informasi Publik yang memiliki pengertian bahwa Indeks PPID adalah alat ukur yang menilai seberapa baik sebuah badan publik dalam mengelola dan melayani permintaan informasi dari masyarakat, serta ketersediaan informasi publik secara proaktif. Semakin tinggi nilainya, semakin baik kualitas pelayanan informasi publiknya.

1. Target Tahun 2024 adalah 84,55:

   Angka ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri menargetkan untuk mencapai skor 84,55 pada Indeks PPID di akhir tahun 2024. Target ini mencerminkan ambisi untuk terus memperbaiki mekanisme pengelolaan informasi, meningkatkan aksesibilitas, dan memastikan bahwa informasi yang dibutuhkan masyarakat dapat terpenuhi dengan baik. Ini adalah standar kinerja yang harus dicapai oleh seluruh jajaran PPID di lingkungan Pemkab Kediri.

2. Realisasi Tahun 2024 adalah 95,91:

   Ini adalah pencapaian yang sangat luar biasa dan patut diapresiasi! Realisasi Indeks PPID sebesar 95,91 di tahun 2024 menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri berhasil melampaui target yang telah ditetapkan secara signifikan. Angka ini merefleksikan keberhasilan nyata dalam upaya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik. Artinya:

   1) Proses pelayanan informasi publik sudah berjalan dengan sangat baik: Mekanisme pengajuan, penanganan, dan penyediaan informasi kepada masyarakat sudah efisien dan responsif.
   2) Ketersediaan informasi proaktif sangat tinggi: Diskominfo dan OPD terkait telah aktif menyediakan berbagai informasi yang wajib tersedia dan diumumkan kepada publik tanpa perlu diminta.
   3) Komitmen kuat terhadap keterbukaan informasi: Capaian ini menjadi bukti komitmen Pemkab Kediri untuk mewujudkan pemerintahan yang transparan dan akuntabel, di mana hak masyarakat untuk mengetahui terjamin dengan baik.

3. Proyeksi Tahun 2025 adalah 95,94:

   Angka proyeksi ini menunjukkan bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri tidak berpuas diri dengan capaian yang sudah sangat tinggi. Dengan realisasi yang telah melampaui target, pemerintah daerah optimis dan berani menetapkan target yang sedikit lebih tinggi untuk tahun 2025. Proyeksi 95,94 mengindikasikan bahwa upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik akan terus dipertahankan dan ditingkatkan menuju level yang lebih optimal, bahkan mendekati kesempurnaan. Ini berarti akan ada terus inovasi dalam penyampaian informasi, peningkatan responsivitas, dan perluasan kanal informasi demi kepuasan pengguna.

Secara keseluruhan, angka-angka Indeks PPID ini adalah cerminan dari perjalanan dan progres luar biasa Kabupaten Kediri dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik yang prima. Realisasi yang jauh melampaui target adalah bukti keberhasilan yang sangat kuat, sementara proyeksi tahun 2025 menunjukkan komitmen berkelanjutan untuk terus berinovasi demi pelayanan informasi publik yang lebih baik di masa depan, sejalan dengan semangat tata kelola pemerintahan yang baik.

Sasaran strategis Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri untuk **"Meningkatkan kualitas pelayanan informasi**

publik" telah menunjukkan hasil yang sangat impresif, sebagaimana terukur dari **Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)**. Dengan target tahun 2024 sebesar **84,55** yang berhasil direalisasikan menjadi **95,91**, serta proyeksi ambisius di tahun 2025 sebesar **95,94**, capaian ini secara langsung menghasilkan serangkaian **outcome** atau hasil jangka menengah yang berdampak pada interaksi antara pemerintah dan masyarakat.

Outcome ini merefleksikan perubahan kondisi, perilaku, atau kapasitas yang terjadi sebagai konsekuensi langsung dari upaya Diskominfo dalam meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik.

1. Peningkatan Aksesibilitas dan Kemudahan Masyarakat dalam Memperoleh Informasi

   Masyarakat Kabupaten Kediri kini merasakan kemudahan yang signifikan dalam mengakses informasi publik. Dengan sistem PPID yang berfungsi sangat baik (tercermin dari Indeks 95,91), proses pengajuan informasi menjadi lebih sederhana, cepat, dan tidak berbelit. Ini berarti hambatan dalam mendapatkan data atau kebijakan pemerintah telah berkurang drastis, memungkinkan warga untuk memperoleh informasi yang mereka butuhkan dengan lebih efisien.
2. Peningkatan Transparansi dan Akuntabilitas Penyelenggaraan Pemerintahan

   Tingginya Indeks PPID menunjukkan bahwa pemerintah Kabupaten Kediri semakin transparan dan akuntabel. Informasi yang sebelumnya mungkin sulit diakses kini tersedia secara lebih luas, baik melalui mekanisme proaktif maupun responsif. Kondisi ini memungkinkan masyarakat untuk memantau kinerja pemerintah, memahami kebijakan yang diambil, dan mengurangi celah untuk praktik yang tidak transparan.
3. Peningkatan Kepercayaan Publik terhadap Pemerintah Daerah

   Ketika masyarakat merasakan kemudahan dan kecepatan dalam memperoleh informasi yang akurat dan relevan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah daerah akan meningkat. Proses yang transparan dan akuntabel membangun keyakinan bahwa pemerintah bekerja untuk kepentingan publik dan tidak ada yang disembunyikan.
4. Peningkatan Pemahaman Masyarakat terhadap Kebijakan dan Program Pemerintah

   Dengan diseminasi informasi yang berkualitas dan mudah diakses, masyarakat menjadi lebih memahami berbagai kebijakan, program, dan

kegiatan yang dijalankan oleh Pemerintah Kabupaten Kediri. Pemahaman yang lebih baik ini dapat mengurangi misinformasi dan meningkatkan dukungan publik terhadap inisiatif pembangunan daerah.

5. Peningkatan Partisipasi Aktif Masyarakat dalam Pengawasan dan Pembangunan

   Akses informasi yang lebih baik memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi lebih aktif dalam pengawasan dan pembangunan daerah. Dengan memiliki informasi yang cukup, warga dapat memberikan masukan yang lebih konstruktif, mengidentifikasi masalah, dan terlibat dalam dialog yang lebih bermakna dengan pemerintah.

Outcome dari Indeks PPID yang sangat tinggi ini adalah terciptanya lingkungan di mana masyarakat merasa lebih berdaya karena mudah mengakses informasi, dan pemerintah menjadi lebih terbuka serta dapat dipercaya. Ini adalah langkah vital menuju tata kelola pemerintahan yang baik dan partisipatif di Kabupaten Kediri.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah menetapkan sasaran strategis "Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik." Keberhasilan sasaran ini diukur melalui Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Dengan target tahun 2024 sebesar 84,55 yang berhasil direalisasikan mencapai 95,91, serta proyeksi tahun 2025 sebesar 95,94, capaian luar biasa ini didukung oleh serangkaian output konkret.

Output adalah hasil langsung dari kegiatan dan program yang dilaksanakan oleh Diskominfo dalam upaya peningkatan kualitas pelayanan informasi publik. Ini adalah produk atau layanan spesifik yang dapat dihitung atau diamati, dan menjadi fondasi bagi capaian Indeks PPID yang tinggi. Berikut adalah output utama yang dihasilkan:

1. Ketersediaan dan Peningkatan Konten Informasi Publik Proaktif

   Jumlah informasi yang tersedia di situs web resmi dan media sosial pemerintah daerah meningkat secara signifikan. Ini mencakup data, dokumen, laporan kinerja, anggaran, program kerja, dan kebijakan pemerintah yang wajib diumumkan.

   Frekuensi pembaruan dan rilis informasi publik terbaru melalui berbagai kanal digital meningkat. Informasi disampaikan secara berkala dan tepat waktu kepada masyarakat.

   Diversifikasi format informasi (infografis, video pendek, artikel populer) untuk memudahkan pemahaman masyarakat luas.

2. **Peningkatan Kanal dan Mekanisme Pelayanan Informasi Publik**

   Pengembangan dan pemeliharaan platform PPID online yang user-friendly dan responsif, seperti portal PPID terpusat atau aplikasi khusus permintaan informasi.

   Jumlah kanal komunikasi alternatif untuk pelayanan informasi publik diperbanyak, misalnya melalui telepon, email, atau layanan tatap muka yang lebih efisien.

   Peningkatan fitur dan kapabilitas sistem manajemen permintaan informasi, yang memungkinkan pelacakan status permintaan dan respons yang lebih cepat.

3. **Peningkatan Kapasitas dan Kompetensi SDM PPID**

   Jumlah petugas PPID di lingkungan Diskominfo dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) lainnya yang telah mengikuti pelatihan dan bimbingan teknis terkait standar pelayanan informasi publik, klasifikasi informasi, dan respons permintaan.

   Peningkatan ketersediaan panduan atau SOP (Standar Operasional Prosedur) yang jelas bagi petugas PPID dalam melayani permintaan informasi.

   Pembentukan atau penguatan tim kerja PPID yang solid dan terkoordinasi di tingkat kabupaten.

4. **Peningkatan Sosialisasi dan Edukasi Hak Atas Informasi Publik**

   Jumlah kegiatan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat mengenai hak dan prosedur permohonan informasi publik meningkat. Ini bisa berupa workshop, seminar, atau kampanye digital.

   Materi edukasi dan panduan akses informasi publik disebarluaskan secara luas melalui berbagai media, memastikan masyarakat memahami bagaimana cara memanfaatkan layanan PPID.

   Jumlah kemitraan dengan organisasi masyarakat sipil atau komunitas lokal dalam upaya penyebarluasan informasi dan peningkatan literasi informasi publik.

Output-output ini adalah bukti nyata dari upaya Diskominfo Kabupaten Kediri dalam membangun ekosistem informasi publik yang kuat dan aksesibel. Realisasi dari output inilah yang secara langsung berkontribusi pada tercapainya Indeks PPID yang sangat tinggi dan pada akhirnya meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik secara keseluruhan. Sasaran strategis Dinas

Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri untuk **"Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik"** telah menunjukkan capaian yang luar biasa. Dengan **Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi)** mencapai **95,91** di tahun 2024, jauh melampaui target **84,55**, dan proyeksi optimis **95,94** di tahun 2025, hal ini tidak hanya menghasilkan *output* dan *outcome* jangka menengah, tetapi juga membawa **impact** jangka panjang yang signifikan bagi Kabupaten Kediri. Impact ini adalah perubahan fundamental dan berkelanjutan yang mengubah kondisi sosial, politik, dan bahkan ekonomi di daerah, sejalan dengan Visi besar Bupati dan Wakil Bupati Kediri.

1) Terwujudnya Tata Kelola Pemerintahan yang Baik (Good Governance) dan Bersih

   Peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, yang diindikasikan oleh Indeks PPID yang sangat tinggi, secara langsung berkontribusi pada terciptanya tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih. Dengan informasi yang transparan dan mudah diakses, praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme menjadi lebih sulit dilakukan. Setiap kebijakan dan penggunaan anggaran dapat diawasi oleh publik, sehingga mendorong akuntabilitas dan integritas di seluruh jajaran pemerintahan Kabupaten Kediri.

2) Peningkatan Partisipasi dan Kepercayaan Masyarakat terhadap Pemerintah

   Ketika masyarakat merasa mudah mendapatkan informasi yang akurat dan relevan, kepercayaan mereka terhadap pemerintah akan meningkat. Hal ini mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan daerah. Warga tidak lagi hanya menjadi objek pembangunan, melainkan subjek yang ikut serta dalam perencanaan, pengawasan, dan evaluasi. Dialog antara pemerintah dan masyarakat menjadi lebih hidup dan konstruktif, menciptakan rasa kepemilikan bersama terhadap kemajuan Kabupaten Kediri.

3) Peningkatan Kualitas Pengambilan Keputusan dan Perumusan Kebijakan Publik

   Dengan adanya arus informasi yang lancar dan terpercaya, para pembuat kebijakan di Kabupaten Kediri dapat merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran dan berbasis kebutuhan riil masyarakat. Informasi yang transparan dari berbagai sektor memungkinkan analisis

yang lebih mendalam, sehingga keputusan yang diambil akan lebih efektif, efisien, dan menjawab permasalahan publik secara akurat.

4) Peningkatan Citra Positif dan Daya Saing Daerah

Kabupaten Kediri yang dikenal sebagai daerah dengan pelayanan informasi publik yang prima akan memiliki citra positif di mata masyarakat luas, baik di tingkat lokal, regional, maupun nasional. Citra ini tidak hanya menarik bagi warga, tetapi juga bagi investor dan pelaku usaha yang mencari lingkungan yang transparan dan dapat diandalkan. Hal ini akan berkontribusi pada peningkatan daya saing daerah dan potensi pertumbuhan ekonomi.

5) Pemberdayaan Masyarakat dan Peningkatan Literasi Informasi

Akses informasi yang mudah dan berkualitas akan memberdayakan masyarakat untuk membuat keputusan yang lebih baik dalam kehidupan pribadi dan profesional mereka. Hal ini juga akan mendorong peningkatan literasi informasi di kalangan warga, menjadikan masyarakat lebih kritis, cerdas dalam menyaring informasi, dan mampu memanfaatkan informasi untuk kemajuan diri dan komunitas.

Impact dari Indeks PPID yang melampaui target ini adalah terciptanya ekosistem pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan dipercaya, yang pada akhirnya membawa Kabupaten Kediri menuju visi besar "Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan" bagi seluruh warganya.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menunjukkan performa luar biasa dalam sasaran strategis "Meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik." Ini terbukti dari capaian Indeks PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) tahun 2024 yang mencapai 95,91, jauh melampaui target 84,55. Dengan proyeksi optimis 95,94 untuk tahun 2025, kesuksesan ini ditopang oleh berbagai faktor pendorong, meski tantangan tetap ada sebagai penghambat.

a. Faktor Pendorong Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan, antara lain:

Pencapaian Indeks PPID yang sangat tinggi di Kabupaten Kediri mencerminkan upaya sistematis dan kolaborasi yang efektif. Beberapa faktor pendorong utama meliputi:

1) Komitmen Kuat Pimpinan Daerah terhadap Keterbukaan Informasi:

Adanya dukungan dan komitmen penuh dari Bupati dan Wakil Bupati Kediri terhadap prinsip keterbukaan informasi. Hal ini menjadi landasan kuat bagi Diskominfo dan seluruh OPD untuk mengimplementasikan kebijakan dan standar PPID secara konsisten. Keterbukaan informasi sejalan dengan visi "Kabupaten Kediri Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan," khususnya pada misi Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan.

2) Peran Aktif Diskominfo sebagai Pusat Informasi:

Diskominfo berperan aktif sebagai sentra pengelolaan dan penyebarluasan informasi publik. Ini mencakup pengembangan sistem PPID, pengelolaan website resmi, media sosial, dan kanal informasi lainnya. Kecepatan dan akurasi dalam merespons permintaan informasi menunjukkan kesiapan Diskominfo dalam menjalankan fungsinya.

3) Pengembangan Infrastruktur dan Platform Digital yang Mendukung:

Investasi dalam platform digital yang user-friendly seperti portal PPID online, serta pemanfaatan website dan media sosial sebagai kanal informasi utama, sangat membantu masyarakat dalam mengakses informasi. Peningkatan kualitas dan ketersediaan infrastruktur TIK juga secara tidak langsung mendukung aksesibilitas informasi.

4) Peningkatan Kapasitas dan Profesionalisme Petugas PPID:

Program pelatihan dan pengembangan bagi petugas PPID di seluruh OPD telah meningkatkan pemahaman mereka tentang standar pelayanan informasi, klasifikasi informasi, dan cara merespons permintaan secara profesional. Petugas yang kompeten menjadi kunci efektivitas pelayanan.

5) Adanya Standar Operasional Prosedur (SOP) yang Jelas:

Penerapan SOP yang baku dan transparan untuk pengelolaan dan pelayanan informasi publik memastikan bahwa setiap permintaan ditangani secara konsisten, cepat, dan sesuai dengan regulasi yang berlaku.

6) Respons Positif dan Kesadaran Masyarakat akan Hak Informasi:

Semakin meningkatnya kesadaran masyarakat akan hak mereka untuk memperoleh informasi telah mendorong pemerintah untuk berinovasi. Pada saat yang sama, kemudahan akses yang diberikan pemerintah juga mendorong masyarakat untuk lebih proaktif dalam mencari informasi.

b. Faktor Penghambat Keberhasilan dalam Pencapaian Tujuan, antara lain:

Meskipun Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah menunjukkan kinerja yang sangat baik dan melampaui sebagian besar target dalam periode 2022-2024, tetap ada beberapa faktor penghambat yang berpotensi memengaruhi optimalisasi capaian atau tantangan yang perlu diatasi. Mengidentifikasi faktor-faktor ini akan membantu Diskominfo dalam merumuskan strategi yang lebih efektif untuk periode Renstra 2025-2029.

1. Keterbatasan Sumber Daya (Anggaran dan Manusia)

   Meskipun capaian terlihat positif, pertumbuhan dan inovasi yang pesat seringkali membutuhkan investasi yang lebih besar.

   - Keterbatasan Anggaran: Untuk menjaga momentum peningkatan kualitas data, keamanan siber, dan digitalisasi layanan, dibutuhkan alokasi anggaran yang memadai. Jika anggaran tidak tumbuh sebanding dengan ambisi target, khususnya di tahun-tahun mendatang dengan target yang lebih tinggi, ini bisa menjadi penghambat. Misalnya, untuk mengadopsi teknologi terbaru atau memperbarui infrastruktur secara berkala, dana yang cukup sangat krusial.
   - Ketersediaan SDM dengan Keahlian Spesifik: Peningkatan Indeks Pembangunan Statistik dan Indeks Teknologi Digital SPBE menunjukkan kebutuhan akan staf dengan keahlian data analis, programmer, dan arsitek sistem yang mumpuni. Demikian pula untuk Indeks KAMI, ketersediaan ahli keamanan siber yang profesional sangat vital. Jika jumlah dan kualitas SDM dengan keahlian spesifik ini tidak mencukupi, bisa menjadi bottleneck dalam pengembangan dan pemeliharaan sistem.

2. Dinamika Perkembangan Teknologi dan Ancaman Siber

   Bidang TIK dan keamanan siber berkembang sangat cepat, membawa tantangan tersendiri.

   - Perkembangan Teknologi yang Cepat: Teknologi digital terus berevolusi. Diskominfo perlu terus beradaptasi dengan tren terbaru untuk mempertahankan relevansi layanan. Jika tidak mampu mengikuti kecepatan inovasi teknologi, ada risiko tertinggal, yang bisa menghambat peningkatan Indeks Teknologi Digital SPBE dan Pemerintah Digital.
   - Ancaman Keamanan Siber yang Semakin Kompleks: Meskipun Indeks KAMI menunjukkan perbaikan, ancaman siber terus berevolusi dan menjadi lebih canggih. Tanpa investasi berkelanjutan dalam teknologi keamanan dan skill tim yang mumpuni, risiko serangan siber tetap tinggi, yang bisa mengganggu layanan dan merusak kepercayaan publik. Ini menjadi tantangan konstan untuk mencapai target Indeks KAMI yang lebih tinggi di masa depan.

3. Koordinasi dan Keterlibatan Lintas Sektor

   Meskipun sudah baik, integrasi penuh selalu memiliki potensi tantangan.

   - Resistensi Perubahan dari OPD Lain: Digitalisasi dan integrasi layanan (tercermin pada Indeks Teknologi Digital SPBE) seringkali memerlukan perubahan proses bisnis di berbagai OPD. Tidak semua OPD mungkin siap atau adaptif terhadap perubahan ini, yang dapat memperlambat proses integrasi dan interoperabilitas sistem.
   - Ketergantungan Data dari Berbagai Sumber: Untuk mencapai Indeks Pembangunan Statistik yang optimal, Diskominfo sangat bergantung pada ketersediaan dan keakuratan data dari OPD lain. Jika ada kendala dalam pengumpulan data dari sumber-sumber ini (misalnya, masalah standardisasi data atau keterlambatan pengiriman), hal ini dapat menghambat kualitas dan ketersediaan data statistik secara keseluruhan.

4. Tantangan dalam Mempertahankan dan Meningkatkan Kepuasan Masyarakat

   Meskipun tingkat kepuasan tinggi, mempertahankannya bukanlah tugas mudah.

- Ekspektasi Masyarakat yang Terus Meningkat: Seiring dengan peningkatan kualitas layanan, ekspektasi masyarakat juga akan terus meningkat. Diskominfo perlu terus berinovasi dan meningkatkan layanan agar dapat melampaui ekspektasi ini, atau setidaknya mempertahankannya, agar Indeks Survei Kepuasan Masyarakat tetap tinggi.
- Literasi Digital Masyarakat yang Bervariasi: Tidak semua lapisan masyarakat memiliki tingkat literasi digital yang sama. Kesenjangan ini bisa menjadi penghambat dalam pemanfaatan layanan digital secara optimal, dan Diskominfo perlu menginvestasikan upaya lebih dalam edukasi dan pendampingan untuk memastikan semua warga dapat mengakses dan memanfaatkan layanan.

Mengatasi faktor-faktor penghambat ini akan menjadi kunci bagi Diskominfo Kabupaten Kediri untuk tidak hanya mempertahankan, tetapi juga melampaui kinerja cemerlangnya di masa depan, mewujudkan transformasi digital yang inklusif dan berkelanjutan bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri.

Diskominfo Kabupaten Kediri dapat menyusun strategi yang lebih tajam dalam Rencana Kerja 2026 untuk mempertahankan capaian luar biasa ini dan terus bergerak maju demi pelayanan informasi publik yang lebih prima dan inklusif berarti melibatkan atau mencakup sebanyak mungkin orang, tanpa memandang perbedaan atau karakteristik tertentu, sehingga setiap orang merasa dihargai, diterima, dan memiliki kesempatan yang sama untuk berpartisipasi dan berkontribusi) dan menghilangkan hambatan (baik fisik, sosial, ekonomi, budaya, maupun mental) yang mungkin membuat seseorang atau kelompok tertentu merasa terpinggirkan atau tidak memiliki akses yang sama**.**

2.3 Analisis Pelaksanaan Rencana Kerja Perangkat Daerah Tahun Lalu dan Capaian Renstra Perangkat Daerah

Evaluasi Rencana Kerja (Renja) Perangkat Daerah, baik untuk tahun lalu maupun tahun berjalan, merupakan proses krusial dalam siklus perencanaan pembangunan. Bagi Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa rumusan kegiatan alternatif dan/atau kegiatan baru yang disusun dalam rancangan awal Renja Perangkat Daerah dilakukan dalam rangka optimalisasi pencapaian sasaran Renstra

Perangkat Daerah. Ini adalah upaya berkelanjutan untuk memastikan bahwa setiap sumber daya yang dialokasikan benar-benar mendukung Visi dan Misi jangka panjang Diskominfo.

Rekapitulasi Evaluasi Hasil Pelaksanaan Renja SKPD dan pencapaian Renstra SKPD s/d Tahun 2025

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/ Bidang Urusan Pemerintah Daerah dan Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja Program (Outcomes / Kegiatan (Output)	Target Kinerja Capaian Program (Resntra SKPD) Tahun 2026	Realisasi Target Kinerja Hasil Program dan Keluaran Kegiatan sd. Tahun 2023	Target dan Realisasi Kinerja Program dan Kegiatan Tahun Lalu (2024)			Target Program / Keg Renja SKPD 2025	Perkiraan Realisasi Capaian Target Renstra SKPD sd. Tahun berjalan	
					Target Renja SKPD	Realisasi Renja SKPD	Tingkat Realisasi		Realisasi Capaian Program dan Kegiatan sd. Tahun berjalan 2024	Tingkat Capaian Realisasi Target Renstra (%)
1	2	3	4	5	6	7	8 =7/6	9	10 = 5+7+9	11 =10/4
	2.16 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA									
	2.16.01 - PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN	Tercapainya dukungan yang optimal	100	100	100	100	100	100	300	75

	DAERAH KABUPATEN/KOTA,	untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah								
k	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	3	3	3	3	100	3	9	2,25
sk	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Tersusunnya Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	1,5
sk	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Tersedianya Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	1	1	1	1	100	1	3	0,75
k	Administrasi Keuangan	Tersusunnya	98	98	98	98	100	98	294	73,5

	Perangkat Daerah	dokumen Administrasi Keuangan Perangkat Daerah								
sk	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Tersedianya Gaji dan Tunjangan ASN	48	48	48	48	100	48	144	36
sk	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Tersedianya Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	12	12	12	12	100	12	36	9
sk	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Terlaksananya Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12	12	12	12	100	12	36	9
sk	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Tersedianya Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1	1	1	1	100	1	3	0,75
sk	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Tersedianya Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/	18	18	18	18	100	18	54	13,5

	Triwulanan/ Semesteran SKPD	Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/ Semesteran SKPD								
sk	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Tersedianya Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2	2	2	2	100	2	6	1,5
k	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	2	2	2	2	100	2	6	1,5
sk	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Terlaksananya Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2	2	2	2	100	2	6	1,5
k	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Tersusunnya dokumen Administrasi Umum	4	4	4	4	100	4	12	3

		Perangkat Daerah								
sk	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Tersedianya Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	2	2	2	2	100	2	6	1,5
sk	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Tersedianya Peralatan dan Perlengkapan Kantor	4	4	4	4	100	4	12	3
sk	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Tersedianya Peralatan Rumah Tangga	4	4	4	4	100	4	12	3
sk	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Tersedianya Bahan Logistik Kantor	4	4	4	4	100	4	12	3
sk	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Tersedianya Barang Cetakan dan Penggandaan	4	4	4	4	100	4	12	3
sk	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Tersedianya Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	3	3	3	3	100	3	9	2,25
sk	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Terlaksananya Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20	20	20	20	100	20	60	15

k	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Tersusunnya dokumen Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	16	16	16	16	100	16	48	12
sk	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Tersedianya Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	12	12	12	12	100	12	36	9
sk	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Tersedianya Jasa Pelayanan Umum Kantor	4	4	4	4	100	4	12	3
k	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	29	29	29	29	100	29	87	21,75
sk	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Tersedianya Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan	10	10	10	10	100	10	30	7,5

		Dinas Jabatan								
sk	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	16	16	16	16	100	16	48	12
sk	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Terlaksananya Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	3	3	3	3	100	3	9	2,25
	2.16.02 - PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
k	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	465	465	465	465	100	465	1395	348,75
sk	Relasi Media	Terlaksananya Relasi Media	10	10	10	10	100	10	30	7,5

sk	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Terlaksananya Kemitraan dengan Pemangku Kepentingan	3	3	3	3	100	3	9	2,25
sk	Pelayanan Informasi Publik	Tersedianya Pelayanan Informasi Publik	5	5	5	5	100	5	15	3,75
sk	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Terlaksananya Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	2	2	2	2	100	2	6	1,5
sk	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	45	45	45	45	100	45	135	33,75
sk	Penyusunan Konten	Terlaksananya Penyusunan Konten	400	400	400	400	100	400	1200	300
	2.16.03- PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA,	Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika	100	100	100	100	100	100	300	75
k	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah	5	5	5	5	100	5	15	3,75

		Daerah Kabupaten/Kota								
sk	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE.	Terlaksananya Kegiatan Fasilitasi Promosi literasi SPBE dan/atau Kolaborasi Penyelenggaraan SPBE	4	4	4	4	100	4	12	3
sk	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas.	Terlaksananya Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	1	1	1	1	100	1	3	0,75
	2.20 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK						100			
	2.20.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)	100	100	100	100	100	100	300	75

k	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Meningkatnya Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	350	350	350	350	100	350	1050	262,5
sk	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Meningkatnya Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	90	90	90	90	100	90	270	67,5
sk	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Meningkatnya Kualitas Statistik Sektoral	90	90	90	90	100	90	270	67,5
sk	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Meningkatnya Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	92	92	92	92	100	92	276	69
sk	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Terlaksananya Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	90	90	90	90	100	90	270	67,5
	2.21 - URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN									

	2.21.02 - PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah	100	100	100	100	100	100	300	75
k	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.	Meningkatnya Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	6	6	6	6	100	6	18	4,5
sk	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Terlaksananya Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6	6	6	6	100	6	18	4,5

Tabel 2.2

2.4 Isu-Isu Penting Penyelenggaraan Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri pada Rencana Kerja (Renja) tahun 2026 dihadapkan pada beberapa isu penting yang selaras dengan isu strategis daerah dan internal dinas. Isu-isu ini menjadi fokus utama untuk memastikan penyelenggaraan tugas dan fungsi Diskominfo berjalan efektif dalam mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif, sesuai dengan Isu Strategis pada Ranwal RPJMD 2025-2029 : Efektivitas tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Isu-isu ini adalah kunci untuk memastikan Diskominfo dapat menjalankan perannya secara optimal dalam mendukung transformasi digital dan pelayanan publik di era modern yaitu:

1. **Pembangunan dan Penguatan Infrastruktur Teknologi dan Analitik Belum Terakselerasi**

   Salah satu isu mendesak dihadapi Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri adalah belum terakselerasinya pembangunan dan penguatan infrastruktur teknologi dan analitik guna mengoptimalkan pemanfaatan data. Ini bukan sekadar tantangan teknis, melainkan fondasi krusial bagi terwujudnya pemerintahan yang modern dan responsif. Di era digital ini, data tanpa infrastruktur yang kokoh, data tersebut hanya akan menjadi tumpukan informasi yang tidak terolah. Saat ini, Kabupaten Kediri menghadapi kenyataan bahwa upaya untuk membangun dan memperkuat jaringan, perangkat keras, perangkat lunak, serta sistem penyimpanan yang canggih masih berjalan lambat. Padahal, infrastruktur inilah yang menjadi tulang punggung bagi semua inovasi digital.

   Keterbatasan ini berdampak langsung pada kemampuan pemerintah daerah untuk memanfaatkan data secara optimal. Proses pengambilan keputusan berbasis bukti menjadi terhambat karena data tidak dapat diolah, dianalisis, atau divisualisasikan dengan cepat dan akurat. Potensi besar dari data penduduk, data layanan publik, atau bahkan data sektor ekonomi lokal, belum sepenuhnya tergali. Ini berarti peluang untuk merumuskan kebijakan yang lebih tepat sasaran, mengidentifikasi masalah lebih dini, dan menyediakan layanan yang lebih personal bagi masyarakat bisa terlewatkan.

   Oleh karena itu, percepatan pembangunan dan penguatan infrastruktur teknologi adalah prioritas utama. Ini mencakup investasi

pada perangkat keras dan lunak terbaru, peningkatan kapasitas jaringan internet pemerintah, pengembangan platform analitik data yang mumpuni, serta peningkatan kapabilitas sumber daya manusia yang mampu mengelola dan memanfaatkan teknologi ini. Dengan fondasi digital yang kuat, Diskominfo dapat membuka jalan bagi inovasi, efisiensi, dan, yang terpenting, pelayanan publik yang lebih baik bagi seluruh masyarakat Kabupaten Kediri.

Ini menunjukkan bahwa fondasi digital di Kabupaten Kediri masih perlu ditingkatkan secara signifikan. Tanpa infrastruktur yang kuat, termasuk jaringan yang andal, perangkat keras dan lunak yang mumpuni, serta kemampuan analitik yang memadai, potensi besar dari data yang ada tidak dapat dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung pengambilan keputusan berbasis bukti dan layanan publik yang cerdas.

2. Pemanfaatan Kanal Digital dalam Penyebaran Informasi Publik Belum Optimal

Diskominfo juga menyoroti belum optimalnya pemanfaatan kanal digital dalam penyebaran informasi publik. Di tengah derasnya arus informasi dan cepatnya perkembangan teknologi, kemampuan pemerintah untuk menyampaikan pesan-pesan penting kepada masyarakat secara efektif melalui platform digital menjadi sangat krusial.

Saat ini, meskipun berbagai kanal digital seperti situs web resmi, media sosial (Facebook, Instagram, Twitter/X, YouTube), hingga aplikasi pesan instan telah tersedia, penggunaannya belum mencapai potensi maksimal. Ini berarti informasi-informasi penting mengenai kebijakan pemerintah, program pembangunan, layanan publik, hingga peringatan dini, mungkin tidak sampai kepada seluruh lapisan masyarakat secara cepat dan merata. Ada potensi besar audiens yang belum terjangkau karena metode penyebaran informasi masih terpaku pada cara-cara konvensional atau penggunaan kanal digital yang belum terintegrasi dan strategis.

Keterbatasan ini dapat berdampak pada tingkat partisipasi masyarakat dalam program-program pemerintah, pemahaman publik terhadap isu-isu krusial, bahkan respons cepat terhadap situasi darurat. Di era digital, masyarakat mengharapkan informasi yang *real-time*, mudah diakses, dan disajikan dalam format yang menarik.

Oleh karena itu, Diskominfo Kabupaten Kediri perlu bergerak lebih jauh dari sekadar memiliki kanal digital. Diperlukan strategi yang lebih komprehensif, mencakup:

- **Diversifikasi konten** yang sesuai dengan karakteristik setiap platform digital.
- **Peningkatan interaksi** dua arah dengan masyarakat.
- **Analisis data** untuk memahami preferensi audiens dan efektivitas pesan.
- **Pemanfaatan teknologi terbaru**, seperti *live streaming* atau infografis interaktif.
- **Peningkatan kapasitas sumber daya manusia** dalam mengelola dan menghasilkan konten digital yang berkualitas.

Di era digital ini, masyarakat mengharapkan akses informasi yang cepat, akurat, dan mudah melalui berbagai platform digital. Keterbatasan dalam pemanfaatan kanal digital berarti informasi penting dari pemerintah mungkin tidak tersampaikan secara efektif kepada seluruh lapisan masyarakat, sehingga menghambat partisipasi publik dan transparansi.

Dengan mengoptimalkan pemanfaatan kanal digital, Diskominfo tidak hanya akan memperluas jangkauan informasinya, tetapi juga meningkatkan transparansi, akuntabilitas, dan pada akhirnya, memperkuat hubungan antara pemerintah dan masyarakat Kabupaten Kediri.

3. Rendahnya Tingkat Implementasi Standar Keamanan Siber

Isu strategis lainnya adalah rendahnya tingkat implementasi standar keamanan siber. Di tengah kian pesatnya digitalisasi layanan pemerintah dan masifnya pertukaran data secara elektronik, keamanan siber bukan lagi sekadar pelengkap, melainkan fondasi mutlak untuk menjaga kepercayaan publik dan kelangsungan operasional pemerintahan.

Dengan semakin meningkatnya ketergantungan pada sistem dan data digital, ancaman siber juga terus berkembang. Kurangnya penerapan standar keamanan siber yang ketat dapat membuat sistem dan data pemerintah rentan terhadap serangan, kebocoran informasi, atau gangguan layanan, yang berpotensi merugikan masyarakat dan integritas pemerintahan. Saat ini, dengan semakin banyaknya data dan sistem vital pemerintah yang berpindah ke ranah digital, risiko serangan siber juga meningkat secara eksponensial. Rendahnya implementasi standar

keamanan siber berarti sistem dan jaringan pemerintah Kabupaten Kediri mungkin rentan terhadap berbagai ancaman, mulai dari peretasan, penyebaran *malware*, pencurian data sensitif, hingga serangan *ransomware* yang dapat melumpuhkan layanan. Ini tidak hanya berpotensi menimbulkan kerugian finansial, tetapi juga dapat merusak reputasi pemerintah dan mengurangi kepercayaan masyarakat.

Kondisi ini bisa disebabkan oleh beberapa faktor, seperti kurangnya pemahaman tentang pentingnya keamanan siber, keterbatasan anggaran untuk investasi teknologi keamanan, atau bahkan kurangnya sumber daya manusia yang terampil di bidang ini. Padahal, penerapan standar keamanan siber yang kuat mencakup berbagai aspek, mulai dari penggunaan *firewall*, sistem deteksi intrusi, enkripsi data, hingga kebijakan pengelolaan kata sandi dan pelatihan kesadaran keamanan bagi seluruh pegawai.

Oleh karena itu, peningkatan implementasi standar keamanan siber adalah prioritas yang tidak bisa ditawar. Diskominfo Kabupaten Kediri harus berinvestasi dalam teknologi keamanan terkini, mengembangkan kebijakan dan prosedur keamanan yang ketat, serta secara rutin melakukan audit keamanan. Yang tak kalah penting adalah membangun budaya keamanan siber di seluruh jajaran pemerintahan, agar setiap individu memahami perannya dalam menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi digital. Dengan demikian, ekosistem digital pemerintah Kabupaten Kediri dapat terlindungi secara optimal dari berbagai ancaman siber yang terus berevolusi.

4. Keterbatasan Infrastruktur untuk Sistem Jaringan Terpadu Pemerintah

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri menghadapi sebuah isu strategis krusial terkait keterbatasan sumber daya infrastruktur yang memadai untuk mengelola sistem jaringan terpadu pemerintah agar terintegrasi. Isu ini menjadi penghalang utama dalam mewujudkan birokrasi yang efisien, responsif, dan terhubung secara digital di seluruh lingkungan Pemerintah Kabupaten Kediri.

Sistem jaringan terpadu merupakan tulang punggung bagi pertukaran data yang lancar, koordinasi antar Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang efektif, dan penyediaan layanan publik yang mulus. Namun, saat ini, Diskominfo dihadapkan pada realitas bahwa

infrastruktur dasar yang ada—mulai dari perangkat keras jaringan seperti router dan switch, kapasitas bandwidth, hingga server penyimpanan data—belum sepenuhnya mampu mendukung visi integrasi sistem secara menyeluruh.

Keterbatasan ini berdampak langsung pada operasional pemerintahan. Tanpa jaringan yang kuat dan terintegrasi, data yang seharusnya mengalir bebas antar OPD sering kali terperangkap dalam "silo-silo" informasi, mengakibatkan duplikasi data, proses yang berulang, dan lambatnya koordinasi. Misalnya, data kependudukan yang mungkin dibutuhkan oleh Dinas Kesehatan atau Dinas Sosial, memerlukan proses manual atau pertukaran data yang tidak efisien karena tidak adanya sistem jaringan terpadu yang memadai. Hal ini tentu saja menghambat kecepatan pelayanan publik dan akurasi informasi yang menjadi dasar pengambilan keputusan.

Diskominfo juga mengakui adanya kurangnya sumber daya infrastruktur yang memadai untuk mengelola sistem jaringan terpadu pemerintah agar terintegrasi. Keterbatasan ini bisa menjadi penghalang serius bagi upaya menciptakan sistem pemerintahan yang terpadu dan efisien. Integrasi sistem antar Perangkat Daerah sangat penting untuk meminimalisir duplikasi data, mempercepat alur kerja, dan meningkatkan koordinasi, yang pada akhirnya berdampak pada efisiensi pelayanan publik.

Oleh karena itu, upaya penguatan dan penyediaan sumber daya infrastruktur jaringan terpadu menjadi prioritas mendesak. Ini mencakup investasi pada teknologi jaringan terbaru, peningkatan kapasitas *bandwidth* yang lebih besar, serta pengembangan pusat data yang aman dan handal. Dengan infrastruktur yang memadai, Diskominfo dapat memfasilitasi terciptanya ekosistem digital pemerintah yang saling terhubung, efisien, dan pada akhirnya, mampu memberikan pelayanan terbaik bagi masyarakat Kabupaten Kediri.

5. Tingkat Kepuasan Masyarakat Terhadap Layanan Langsung Diskominfo Belum Optimal

Salah satu isu strategis yang menjadi perhatian serius Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri adalah tingkat kepuasan masyarakat terhadap layanan langsung Diskominfo yang

belum optimal. Ini adalah indikator krusial yang secara langsung mencerminkan kualitas interaksi antara pemerintah dan warga.

Layanan langsung Diskominfo, yang bisa meliputi berbagai aktivitas seperti pengurusan izin, konsultasi terkait teknologi informasi, atau akses terhadap fasilitas publik yang disediakan Diskominfo, adalah wajah pemerintah di mata masyarakat. Ketika tingkat kepuasan di area ini belum optimal, ini mengindikasikan adanya ruang untuk perbaikan yang signifikan.

Beberapa faktor bisa menjadi penyebab rendahnya tingkat kepuasan ini. Mungkin saja proses layanan masih dirasa berbelit-belit atau kurang transparan. Waktu tunggu yang lama, kurangnya informasi yang jelas, atau kurangnya keramahan petugas juga bisa menjadi pemicu ketidakpuasan. Di era digital ini, masyarakat mengharapkan layanan yang cepat, mudah diakses, dan responsif, bahkan untuk interaksi tatap muka.

Oleh karena itu, Diskominfo perlu melakukan evaluasi mendalam terhadap setiap aspek layanan langsungnya. Ini bisa meliputi penyederhanaan prosedur, peningkatan kompetensi dan keramahan sumber daya manusia yang berinteraksi langsung dengan masyarakat, perbaikan fasilitas pendukung layanan, hingga pemanfaatan teknologi untuk mempercepat antrean atau memberikan informasi pendukung.

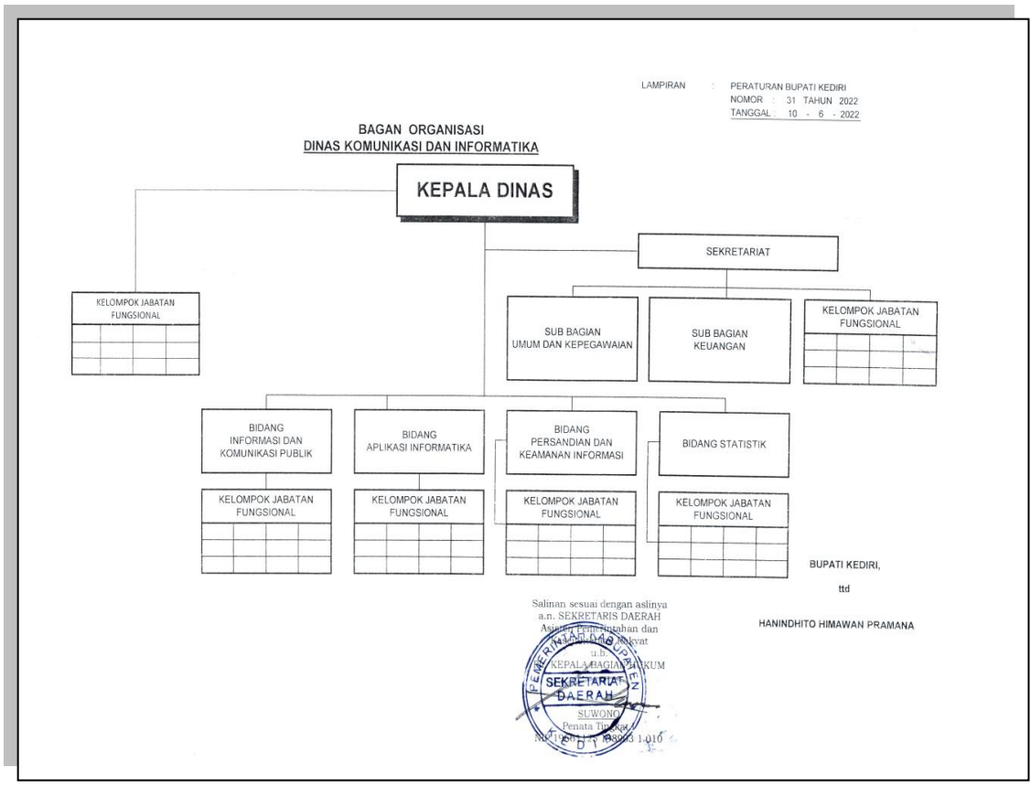
Dengan berinvestasi pada peningkatan kualitas layanan langsung, Diskominfo tidak hanya akan memperbaiki citra diri, tetapi juga secara langsung meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat terhadap pemerintah Kabupaten Kediri secara keseluruhan. Mewujudkan layanan yang prima adalah langkah nyata menuju tata kelola pemerintahan yang adaptif dan berorientasi pada kebutuhan warga.

Dengan fokus pada isu-isu strategis ini, Diskominfo Kabupaten Kediri berkomitmen untuk memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas diseminasi informasi, menjaga keamanan siber, dan pada akhirnya, memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif di tahun 2026. Dengan capaian kinerja yang impresif di tahun-tahun sebelumnya, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memasuki tahun 2026 dengan komitmen kuat untuk terus memperkuat infrastruktur digital, meningkatkan kualitas diseminasi informasi, menjaga keamanan siber, dan pada akhirnya, memberikan pelayanan publik yang lebih baik dan responsif. Fokus pada isu-isu

strategis ini akan didukung penuh oleh struktur organisasi Diskominfo yang adaptif dan berorientasi pada hasil. Seluruh upaya strategis ini tidak terlepas dari peran krusial struktur organisasi Diskominfo Kabupaten Kediri. Sekretariat akan memastikan dukungan administratif, pengelolaan anggaran, dan sumber daya manusia berjalan lancar, menjadi tulang punggung bagi operasional seluruh bidang. Kemudian, Kepala Dinas sebagai pemimpin, akan memberikan arah strategis, memastikan koordinasi antar bidang, dan menjaga sinergi dengan berbagai pemangku kepentingan, baik di internal pemerintah daerah maupun dengan masyarakat.

Dengan sinergi antara Visi Strategis yang jelas dan struktur organisasi yang kuat, Diskominfo Kabupaten Kediri optimis dapat mencapai target-target ambisius di tahun 2026, mewujudkan pelayanan publik yang lebih efisien, transparan, dan inovatif demi kemajuan Kabupaten Kediri.

STRUKTUR ORGANISASI
DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI



Gambar 1.1

2.5 Review terhadap Rancangan Awal RKPD

Penentuan prioritas pembangunan di Kabupaten Kediri untuk tahun 2026 akan didasarkan pada kerangka kerja yang komprehensif, memastikan setiap langkah selaras dengan visi jangka panjang dan kebutuhan mendesak daerah. Proses ini berpegang pada empat pilar utama:

1. Tujuan dan Sasaran RPJMD 2025-2029: Prioritas pembangunan akan secara langsung merujuk pada tujuan dan sasaran pembangunan yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) 2025-2029. Sasaran-sasaran ini kemudian akan diterjemahkan ke dalam indikator kinerja yang terukur, sehingga kemajuan dapat dipantau secara berkala selama periode lima tahun tersebut. Ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan berkontribusi pada pencapaian target yang telah ditetapkan.
2. Program Prioritas RPJMD 2025-2029: Penentuan prioritas juga akan dijabarkan dari program-program prioritas yang tercantum dalam RPJMD tahun 2025-2029. Program-program ini merupakan implementasi konkret dari sasaran yang ingin dicapai, menjadi panduan bagi Perangkat Daerah dalam menyusun rencana kerja mereka. Dengan demikian, setiap upaya pembangunan akan terfokus pada inisiatif-inisiatif kunci yang telah ditetapkan secara strategis.
3. Tema dan Kebijakan Pembangunan 2026: Prioritas pembangunan tahun 2026 akan dibentuk berdasarkan tema dan kebijakan pembangunan yang spesifik untuk tahun tersebut, namun tetap berakar kuat pada RPJMD 2025-2029. Ini memungkinkan adanya fleksibilitas untuk menyesuaikan dengan dinamika dan kebutuhan tahunan, tanpa kehilangan arah dari rencana strategis jangka menengah daerah.
4. Permasalahan Mendesak dan Isu Strategis 2026: Terakhir, namun tak kalah penting, adalah mempertimbangkan permasalahan mendesak dan isu-isu strategis yang diperkirakan akan muncul atau menjadi krusial pada tahun 2026. Ini memastikan bahwa prioritas pembangunan tidak hanya berorientasi pada target jangka panjang, tetapi juga responsif terhadap kondisi aktual dan tantangan yang harus segera diatasi untuk kesejahteraan masyarakat Kabupaten Kediri.

Melalui pendekatan yang terstruktur ini, diharapkan pembangunan di Kabupaten Kediri pada tahun 2026 dapat berjalan efektif, efisien, dan memberikan dampak nyata bagi peningkatan kualitas hidup masyarakat.

Berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (Inmendagri) Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2025, Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan tiga urusan pemerintahan wajib. Ketiga urusan ini menjadi landasan utama bagi Diskominfo dalam merumuskan program dan kegiatannya untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis digital, yaitu:

1. Urusan Komunikasi dan Informatika

Urusan ini adalah inti dari tugas dan fungsi Diskominfo. Meliputi pengelolaan dan pengembangan infrastruktur komunikasi dan informatika pemerintah daerah, seperti jaringan internet, pusat data, dan aplikasi pemerintahan. Selain itu, urusan ini juga mencakup aspek **diseminasi informasi publik** melalui berbagai kanal digital dan konvensional, memastikan masyarakat mendapatkan informasi yang akurat dan tepat waktu. Keamanan siber dan pengembangan kapasitas sumber daya manusia di bidang TIK juga menjadi bagian integral dari urusan ini.

2. Urusan Statistik

Dalam era *data-driven government*, urusan statistik menjadi sangat vital. Diskominfo bertanggung jawab dalam pengelolaan data statistik sektoral yang dihasilkan oleh Perangkat Daerah lain, serta melakukan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik untuk mendukung perencanaan dan pengambilan keputusan. Urusan ini memastikan ketersediaan data yang valid dan relevan sebagai dasar kebijakan pembangunan daerah.

3. Urusan Persandian

Urusan persandian berfokus pada **pengamanan informasi pemerintah**. Ini mencakup pengelolaan sistem persandian, penerapan kriptografi, serta pengamanan komunikasi elektronik dan fisik untuk menjaga kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan informasi strategis pemerintah daerah. Dengan semakin meningkatnya ancaman siber, urusan ini menjadi garda terdepan dalam melindungi data dan komunikasi vital dari potensi penyadapan atau penyalahgunaan.

Ketiga urusan wajib ini saling berkaitan dan membentuk sinergi dalam upaya Diskominfo Kabupaten Kediri untuk membangun ekosistem digital pemerintah yang kuat, transparan, dan aman, demi mendukung pembangunan daerah dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri telah merancang berbagai program strategis dengan outcome yang jelas untuk mendukung efektivitas tata kelola pemerintahan di era digital. Program-program ini mencerminkan komitmen Diskominfo dalam memberikan dukungan optimal, meningkatkan kualitas informasi publik, mengelola aplikasi informatika, menyelenggarakan statistik sektoral, serta memperkuat keamanan siber dan persandian.

1. **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (2.16.01)**

   Program ini berfokus pada dukungan administratif dan operasional untuk memastikan seluruh fungsi Diskominfo berjalan lancar. Outcome yang ingin dicapai adalah tercapainya dukungan yang optimal untuk kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan daerah. Ini berarti memastikan ketersediaan sumber daya, fasilitas, dan sistem internal yang memadai agar Diskominfo dapat menjalankan tugas pokok dan fungsinya secara efektif, yang pada akhirnya turut menunjang kelancaran seluruh roda pemerintahan Kabupaten Kediri.

2. **Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik (2.16.02)**

   Program ini bertujuan untuk meningkatkan transparansi dan aksesibilitas informasi pemerintah kepada masyarakat. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah. Ini akan dicapai melalui strategi komunikasi yang efektif, pemanfaatan beragam kanal digital (media sosial, situs web, aplikasi), serta produksi konten yang informatif dan menarik, sehingga pesan-pesan pemerintah dapat tersampaikan secara luas dan mudah dipahami oleh publik.

3. **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika (2.16.03)**

   Fokus utama program ini adalah pada pengelolaan dan pengembangan sistem dan aplikasi teknologi informasi yang digunakan oleh pemerintah daerah. Outcome yang dituju adalah meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika. Ini mencakup pemeliharaan rutin, pengembangan fitur baru, memastikan interoperabilitas antar aplikasi, serta meningkatkan keamanan dan kenyamanan penggunaan aplikasi-aplikasi yang mendukung layanan internal maupun eksternal pemerintah.

4. Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral (2.20.02)

Program ini menyoroti peran Diskominfo dalam menyediakan data yang akurat dan terstandardisasi untuk perencanaan pembangunan. Outcome yang ingin dicapai adalah tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN). Diskominfo akan berperan aktif dalam mengoordinasikan pengumpulan, pengolahan, analisis, dan diseminasi data statistik sektoral dari berbagai OPD, memastikan data tersebut valid dan dapat diandalkan sebagai dasar kebijakan.

5. Program Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi (2.21.02)

Mengingat pentingnya keamanan di era digital, program ini berfokus pada perlindungan informasi dan sistem elektronik pemerintah. Outcome yang diharapkan adalah meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah. Ini akan diwujudkan melalui penerapan standar keamanan siber yang ketat, penggunaan teknologi persandian, serta pelatihan dan peningkatan kesadaran keamanan bagi seluruh pegawai, guna melindungi data strategis dari ancaman siber.

Melalui kelima program ini, Diskominfo Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus berinovasi dan memperkuat kapasitasnya sebagai pilar utama dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan digital yang efektif, efisien, dan aman, demi kemajuan Kabupaten Kediri.

Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri memiliki serangkaian kegiatan strategis yang dirancang untuk mendukung kelancaran operasional pemerintahan, mengoptimalkan komunikasi publik, serta memperkuat fondasi digital daerah. Kesembilan kegiatan ini terbagi dalam beberapa program utama, mencerminkan komitmen Diskominfo dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang adaptif, responsif, dan berbasis teknologi.

a. Mendukung Kelancaran Administrasi dan Operasional

Beberapa kegiatan Diskominfo berfokus pada penunjang urusan pemerintahan daerah, memastikan aspek internal berjalan efektif:

1. Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah (2.16.01.2.01):

   Kegiatan ini vital untuk memastikan setiap program dan kegiatan Diskominfo direncanakan dengan matang, didukung

anggaran yang memadai, dan dievaluasi secara berkala untuk mencapai target kinerja yang optimal.

2. Administrasi Keuangan Perangkat Daerah (kode 2.16.01.2.02).

   Kegiatan ini merupakan jantung dari pengelolaan sumber daya Diskominfo. Ini mencakup seluruh siklus keuangan, mulai dari perencanaan anggaran yang cermat, pelaksanaan pengeluaran yang efisien dan sesuai regulasi, hingga pelaporan keuangan yang akuntabel dan transparan. Administrasi keuangan yang baik memastikan bahwa setiap dana yang dialokasikan, baik untuk pengembangan infrastruktur digital, program komunikasi publik, maupun kegiatan statistik dan persandian, digunakan secara optimal.

3. Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah (2.16.01.2.03):

   Fokus pada pengelolaan aset-aset Diskominfo, termasuk inventarisasi, pemeliharaan, dan pencatatan, demi efisiensi penggunaan dan akuntabilitas.

4. Administrasi Umum Perangkat Daerah (2.16.01.2.06):

   Mencakup berbagai layanan administratif internal yang mendukung kelancaran operasional sehari-hari Diskominfo, seperti surat-menyurat, kearsipan, dan kepegawaian.

5. Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.16.01.2.08):

   Kegiatan ini memastikan ketersediaan berbagai jasa pendukung yang diperlukan untuk operasional Diskominfo, seperti layanan kebersihan, keamanan, dan transportasi.

6. Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah (2.16.01.2.09):

   Merawat dan memastikan seluruh aset dan infrastruktur Diskominfo, termasuk peralatan teknologi, berfungsi optimal dan siap pakai.

b. Mengoptimalkan Informasi dan Komunikasi Publik

Dalam ranah informasi dan komunikasi, Diskominfo memiliki satu kegiatan kunci:

1. Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.02.2.01): Kegiatan ini menjadi

ujung tombak Diskominfo dalam menyebarluaskan informasi kebijakan, program, dan kegiatan pemerintah daerah kepada masyarakat. Ini melibatkan pengelolaan berbagai kanal komunikasi digital dan konvensional, produksi konten informatif, serta peningkatan partisipasi publik melalui komunikasi dua arah.

c. Mengelola Aplikasi dan Infrastruktur Digital

Diskominfo juga berfokus pada pengelolaan ekosistem digital pemerintah:

1. Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.16.03.2.02): Kegiatan ini krusial untuk memastikan sistem dan aplikasi elektronik pemerintah berjalan lancar, interoperabel, dan aman. Ini mencakup pengembangan, pemeliharaan, dan peningkatan aplikasi-aplikasi yang mendukung pelayanan publik dan efisiensi internal pemerintahan.

d. Menguatkan Data dan Keamanan Siber

Dua kegiatan terakhir menekankan pentingnya data dan keamanan informasi:

1. Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota (2.20.02.2.01): Kegiatan ini bertanggung jawab atas pengumpulan, pengolahan, analisis, dan penyajian data statistik dari berbagai sektor di Kabupaten Kediri. Data yang akurat dan terstandardisasi ini menjadi dasar penting bagi perencanaan pembangunan yang tepat sasaran.
2. Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota (2.21.02.2.01): Kegiatan ini adalah garda terdepan dalam melindungi informasi strategis pemerintah dari ancaman siber. Fokusnya adalah pada penerapan standar keamanan siber, pengelolaan sistem persandian, serta pengamanan komunikasi elektronik untuk menjaga kerahasiaan dan integritas data pemerintah daerah.

Melalui sinergi dari seluruh kegiatan ini, Diskominfo Kabupaten Kediri berupaya maksimal untuk memberikan dukungan teknologi informasi dan komunikasi yang komprehensif, transparan, dan aman, demi kemajuan dan pelayanan prima bagi masyarakat Kediri.

REVIEW TERHADAP RANCANGAN AWAL RKPD TAHUN 2026

KABUPATEN KEDIRI

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

NO	RANCANGAN AWAL RKPD					HASIL ANALISIS KEBUTUHAN				KEBUTUHAN DANA	CATATAN PENTING
	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN	PAGU INDIKATIF	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	TARGET CAPAIAN		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			8.239.794.017	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			8.239.794.017	
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			1.180.000	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			1.180.000	
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	590.000	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	2 Dokumen	590.000	
	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah	1 Laporan	590.000	Koordinasi dan	Kab.	Jumlah	1 Laporan	590.000	

	Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kediri, Ngasem, Doko	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kediri, Ngasem, Doko	Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD			
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			6.453.285.223	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			6.453.285.223	
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/ bulan	5.775.085.223	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	48 Orang/bulan	5.775.085.223	
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kab. Kediri, Ngasem,	Jumlah Dokumen Hasil	13 Dokumen	530.400.000	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas	Kab. Kediri, Ngasem,	Jumlah Dokumen Hasil	13 Dokumen	530.400.000	

	ASN	Doko	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			ASN	Doko	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN			
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	146.030.000	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	12 Dokumen	146.030.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	590.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	1 Laporan	590.000	
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	590.000	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/	18 Laporan	590.000	

	Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			Triwulanan/ Semesteran SKPD		Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD			
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	590.000	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	2 Dokumen	590.000	
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			45.000.000	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			45.000.000	
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	45.000.000	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	2 Dokumen	45.000.000	

	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			879.528.000	Administrasi Umum Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			879.528.000	
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.300.000	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2 Paket	2.300.000	
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.200.000	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	4 Paket	30.200.000	
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	181.000.000	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	4 Paket	181.000.000	
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.405.000	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	4 Paket	2.405.000	

	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.632.500	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5 Paket	5.632.500	
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	3 Dokumen	1.800.000	
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	656.190.500	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	20 Laporan	656.190.500	
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			734.000.794	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			734.000.794	
	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Kediri,	Jumlah Laporan	12 Laporan	420.000.794	Penyediaan Jasa Komunikasi,	Kab. Kediri,	Jumlah Laporan	12 Laporan	420.000.794	

	Sumber Daya Air dan Listrik	Ngasem, Doko	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			Sumber Daya Air dan Listrik	Ngasem, Doko	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan			
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	314.000.000	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	0 Laporan	314.000.000	
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			126.800.000	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			126.800.000	
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	0	0 0	26.300.000	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	0	0 0	26.300.000	

	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.500.000	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	20 Unit	50.500.000	
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	3 Unit	50.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			2.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			2.000.000.000	
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			2.000.000.000	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			2.000.000.000	
	Relasi Media	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		0 0	900.000.000	Relasi Media	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		0 0	900.000.000	

	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			100.000.000	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			100.000.000	
	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		0 0	100.000.000	Pelayanan Informasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		0 0	100.000.000	
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		1 0	100.000.000	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		1 0	100.000.000	
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		2 0	700.000.000	Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko		2 0	700.000.000	
	Penyusunan Konten	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Konten Informasi Publik	900 Konten	100.000.000	Penyusunan Konten	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Konten Informasi Publik	900 Konten	100.000.000	
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			3.000.000.000	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			3.000.000.000	
	Pengelolaan E-government di	Kab. Kediri,			3.000.000.000	Pengelolaan E-government di	Kab. Kediri,			3.000.000.000	

	Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ngasem, Doko				Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota	Ngasem, Doko				
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	2.950.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	4 Laporan	2.950.000.000	
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	50.000.000	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/Kota Cerdas	2 Dokumen	50.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			574.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			574.000.000	

	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			574.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			574.000.000	
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			574.000.000	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			574.000.000	
	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	400.000.000	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	90 %	400.000.000	
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90 %	50.000.000	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	90 %	50.000.000	
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan	Kab. Kediri, Ngasem,	Jumlah pegawai yang mendapatkan	90 Orang	50.000.000	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan	Kab. Kediri, Ngasem,	Jumlah pegawai yang mendapatkan	90 Orang	50.000.000	

	Statistik Sektoral	Doko	pelatihan di bidang statistik			Statistik Sektoral	Doko	pelatihan di bidang statistik			
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	90 %	74.000.000	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	90 %	74.000.000	
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			501.000.000	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			501.000.000	
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			501.000.000	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			501.000.000	
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			501.000.000	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			501.000.000	

	Kabupaten/Kota					Kabupaten/Kota					
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	501.000.000	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	6 Laporan	501.000.000	

Tabel 2.3

2.6 Penelaahan Usulan Program dan Kegiatan Masyarakat

Usulan Program dan Kegiatan dari Para Pemangku Kepentingan Tahun 2026

Kabupaten Kediri

Nama Perangkat Daerah : Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri

NO	PROGRAM/ KEGIATAN	LOKASI	INDIKATOR KINERJA	BESARAN/ VOLUME	CATATAN
1	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK	Kab. Kediri, Ngasem, Doko			
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota				
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Terlaksananya Pengelolaan Media Komunikasi Publik	Rp. 50.000.000	36 Media

Tabel 2.4

BAB III

TUJUAN DAN SASARAN PERANGKAT DAERAH

3.1 Telaahan Terhadap Kebijakan Nasional

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2026 disusun berdasarkan kerangka regulasi perencanaan pembangunan nasional dan daerah yang berlaku. Pedoman ini memastikan bahwa setiap program dan kegiatan Diskominfo selaras dengan visi pembangunan Kabupaten Kediri dan memberikan kontribusi nyata bagi masyarakat.

Payung hukum utama yang menjadi dasar penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2026 adalah Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN). Undang-undang ini membentuk kerangka besar bagi seluruh tahapan perencanaan, mulai dari tingkat nasional hingga daerah. Sedangkan mengenai tata cara pengendalian dan evaluasi pelaksanaan rencana pembangunan diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006. Regulasi ini memastikan bahwa setiap rencana pembangunan yang telah disusun dapat dipantau pelaksanaannya dan dievaluasi efektivitasnya, sehingga penyimpangan dapat diminimalisir dan tujuan pembangunan dapat tercapai. Pada lingkup daerah, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 memberikan panduan yang lebih rinci. Peraturan ini mengatur secara spesifik tata cara perencanaan, pengendalian, dan evaluasi pembangunan daerah. Selain itu, Permendagri ini juga mengatur tata cara evaluasi rancangan Peraturan Daerah terkait Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), serta prosedur perubahan terhadap rencana-rencana tersebut dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD).

Dalam seluruh regulasi perencanaan pembangunan yang berlaku, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri, secara tegas diamanatkan bahwa proses penyusunan rencana pembangunan harus mengadopsi dan memadukan beberapa pendekatan kunci. Integrasi pendekatan ini bertujuan untuk menghasilkan rencana yang komprehensif, relevan, dan berkelanjutan.

Berikut adalah pendekatan-pendekatan utama yang menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Dinas Komunikasi dan Informatika Kabupaten Kediri Tahun 2026 :

1. Pendekatan Teknokartik: Dalam menyusun Renja 2026, Diskominfo akan memanfaatkan metode dan kerangka berpikir ilmiah untuk mengidentifikasi kebutuhan, merumuskan program, dan mengalokasikan anggaran. Proses perencanaan belanja dan pembiayaan akan melibatkan konsultasi dengan para pakar di bidang teknologi informasi, komunikasi, statistik, dan persandian, memastikan keputusan berbasis data dan analisis mendalam.
2. Pendekatan Partisipatif: Diskominfo berkomitmen untuk melibatkan seluruh pemangku kepentingan pembangunan dalam proses perencanaan. Ini akan diwujudkan melalui partisipasi aktif dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) di berbagai tingkatan. Masukan dari masyarakat, komunitas TIK, sektor swasta, dan akademisi akan menjadi bahan pertimbangan penting dalam merumuskan program-program yang relevan dan menjawab kebutuhan riil masyarakat.
3. Pendekatan Bottom-Up: Proses perencanaan Diskominfo juga akan mengakomodasi aspirasi dari tingkat bawah. Melalui koordinasi dengan Perangkat Daerah lain dan partisipasi dalam proses perencanaan berjenjang, Diskominfo akan mengidentifikasi kebutuhan spesifik dari tingkat Desa, Kecamatan, hingga Kabupaten. Ini memastikan bahwa program Diskominfo mendukung inisiatif digitalisasi yang muncul dari akar rumput.
4. Pendekatan Top-Down: Diskominfo akan memastikan bahwa Renja 2026 selaras dengan arah kebijakan pembangunan nasional dan provinsi, serta RPJMD Kabupaten Kediri. Proses perencanaan akan menganut asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan, mengintegrasikan arahan strategis dari pemerintah pusat dan provinsi ke dalam program-program Diskominfo, sekaligus menjalankan kewenangan yang dilimpahkan secara efektif.

Dengan memadukan keempat pendekatan ini, perencanaan pembangunan di Kabupaten Kediri, khususnya dalam penyusunan Renja Diskominfo Tahun 2026, diharapkan dapat menghasilkan dokumen perencanaan yang kokoh, adaptif, responsif, dan mampu mendorong tercapainya tujuan pembangunan daerah secara optimal.

3.2 Tujuan dan Sasaran Rencana Kerja Perangkat Daerah

Penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah manifestasi konkret dari komitmen Diskominfo untuk menjadi agen kunci dalam mewujudkan masa depan Kabupaten Kediri yang lebih baik. Dokumen strategis ini dirancang secara cermat sebagai panduan utama bagi seluruh program dan kegiatan Diskominfo selama lima tahun ke depan, dengan satu tujuan fundamental: mendukung terwujudnya visi dan misi Pemerintah Kabupaten Kediri yang telah ditetapkan secara ambisius dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029.

Sebagai garda terdepan dalam transformasi digital dan pengelolaan informasi publik, Renstra Diskominfo tidak hanya berfokus pada pengembangan internal dinas. Sebaliknya, setiap tujuan, sasaran, dan strategi yang dirumuskan di dalamnya secara langsung berorientasi pada pencapaian indikator-indikator kunci RPJMD. Ini memastikan bahwa upaya Diskominfo dalam memperkuat infrastruktur teknologi, mengoptimalkan komunikasi publik, meningkatkan keamanan siber, dan menyediakan data yang akurat, tidak berjalan sendiri, melainkan terintegrasi penuh dalam kerangka pembangunan daerah secara keseluruhan.

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029 adalah bukti bahwa Diskominfo Kabupaten Kediri memahami perannya yang krusial sebagai katalisator bagi tata kelola pemerintahan yang adaptif dan responsif. Dengan Renstra 2025-2029, Diskominfo bertekad untuk menjadi pilar digital yang kokoh, menopang Visi besar Kabupaten Kediri dalam mencapai kemajuan, efisiensi birokrasi, dan kualitas pelayanan publik yang prima bagi seluruh masyarakat.

Kabupaten Kediri telah menetapkan arah pembangunan jangka menengahnya melalui Visi dan Misi yang tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029. Dokumen ini menjadi pedoman utama bagi seluruh jajaran pemerintah daerah dan pemangku kepentingan dalam merencanakan serta melaksanakan program pembangunan. Penjabaran Visi dan Misi Kabupaten Kediri pada Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025–2029 adalah sebagai berikut:

1. Visi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Visi Kabupaten Kediri untuk periode 2025–2029 adalah "Kabupaten Kediri yang Berbudaya, Religius, Maju, Sejahtera, dan Berkelanjutan."

Visi ini mencerminkan sebuah cita-cita jangka panjang untuk membangun Kabupaten Kediri sebagai wilayah yang berkembang secara holistik. Penekanannya bukan hanya pada kemajuan ekonomi dan infrastruktur semata, melainkan juga pada penghormatan dan pelestarian nilai-nilai budaya serta agama. Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus bergerak maju dengan memperkuat berbagai sektor, mulai dari ekonomi, sosial, hingga lingkungan, yang pada akhirnya bertujuan untuk menghadirkan kesejahteraan yang merata bagi seluruh masyarakat. Aspek keberlanjutan juga menjadi inti, memastikan bahwa pembangunan yang dilakukan saat ini tidak mengorbankan hak generasi mendatang.

2. Misi RPJMD Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029

Untuk mewujudkan Visi yang ambisius tersebut, dan dengan mempertimbangkan perubahan paradigma serta kondisi yang akan dihadapi di masa mendatang, ditetapkan tujuh misi pembangunan Kabupaten Kediri Tahun 2025–2029, yaitu:

a. *Misi 1*: Pengembangan SDM yang Berkarakter Unggul dan Berdaya Saing Serta Nasionalis-Religius

   Misi ini berfokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia Kabupaten Kediri, baik dari segi kompetensi dan daya saing global, maupun dari segi karakter yang menjunjung tinggi nilai-nilai nasionalisme dan religiusitas.

b. *Misi 2*: Pengembangan Ekonomi Kerakyatan, Revitalisasi Pertanian Melalui Pemanfaatan Potensi Lokal

   Misi ini bertujuan untuk memperkuat fondasi ekonomi daerah dengan mengedepankan potensi lokal, khususnya melalui pengembangan ekonomi kerakyatan dan revitalisasi sektor pertanian.

c. *Misi 3*: Reformasi Birokrasi dan Tata Kelola Pemerintahan

   Misi ini menitikberatkan pada perbaikan sistem birokrasi dan tata kelola pemerintahan agar menjadi lebih efektif, efisien, transparan, dan akuntabel dalam melayani masyarakat.

d. *Misi 4*: Pembangunan Wilayah dan Infrastruktur

   Misi ini fokus pada pemerataan dan peningkatan kualitas pembangunan wilayah serta penyediaan infrastruktur yang memadai untuk mendukung konektivitas dan aktivitas ekonomi masyarakat.

e. *Misi 5*: Pengembangan Pariwisata, Seni Budaya, Olahraga, dan Kreativitas Pemuda

   Misi ini bertujuan untuk mengoptimalkan potensi pariwisata, melestarikan seni dan budaya lokal, mengembangkan olahraga, serta mendorong kreativitas dan inovasi di kalangan pemuda.

f. *Misi 6*: Penguatan Ketahanan Wilayah Terhadap Risiko Bencana dan Keberlanjutan Lingkungan

   Misi ini menekankan pentingnya mitigasi dan adaptasi terhadap risiko bencana, serta komitmen terhadap pembangunan yang menjaga keseimbangan dan kelestarian lingkungan hidup.

g. *Misi 7*: Kemandirian Desa untuk Kesejahteraan Masyarakat

   Misi ini bertujuan untuk memperkuat kapasitas dan otonomi desa sebagai ujung tombak pembangunan, sehingga desa-desa dapat lebih mandiri dalam mengelola potensi dan sumber dayanya demi peningkatan kesejahteraan masyarakat di tingkat lokal.

Visi dan Misi ini akan menjadi panduan bagi seluruh Perangkat Daerah, termasuk Diskominfo, dalam menyusun rencana kerja dan melaksanakan program guna mencapai cita-cita pembangunan Kabupaten Kediri di tahun-tahun mendatang. Dalam rangka mewujudkan Visi dan Misi Kepala Daerah, Diskominfo Kabupaten Kediri telah merumuskan tujuan dan sasaran yang terukur dalam Rencana Kerja Perangkat Daerah (Renja). Tujuan 3: Terwujudnya transformasi tata kelola pemerintahan yang berintegritas dan adaptif. Tujuan ini akan diukur melalui Indeks Reformasi Birokrasi, yang secara langsung mencerminkan tingkat keberhasilan dalam menciptakan birokrasi yang lebih efisien, transparan, dan akuntabel. Untuk mencapai tujuan tersebut, Diskominfo Kabupaten Kediri menetapkan: Sasaran 6: Terwujudnya digitalisasi pemerintahan untuk peningkatan pelayanan publik. Sasaran ini menegaskan komitmen Diskominfo dalam memanfaatkan teknologi untuk meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat. Keberhasilan Sasaran 6 akan diukur melalui beberapa Indikator Kinerja Daerah (IKD) atau Indikator Kinerja Utama (IKU) Bupati Kediri, yaitu Indeks Pembangunan Teknologi

Informasi dan Komunikasi (IP-TIK), Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) untuk tahun 2025, Indeks Pemerintah Digital (IPD) mulai tahun 2026 s.d 2030, Indeks Masyarakat Digital Indonesia (IMDI). Transisi Pengukuran dari SPBE ke Indeks Pemerintah Digital (IPD) yaitu pada tahun 2025. Dalam hal ini kerangka evaluasi Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) masih menjadi acuan utama untuk mengukur kematangan implementasi e-government di instansi pemerintah. SPBE, yang diatur dalam Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, adalah fondasi penting yang telah diletakkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, efektif, transparan, dan akuntabel, serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya melalui pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi.

Sepanjang tahun 2025, fokus masih pada penguatan dan penyempurnaan implementasi SPBE di berbagai domain, seperti tata kelola SPBE, manajemen SPBE, layanan SPBE, dan infrastruktur SPBE. Evaluasi SPBE tahunan terus dilakukan untuk mengukur sejauh mana instansi pusat dan daerah telah menerapkan prinsip-prinsip SPBE, mengidentifikasi area perbaikan, dan mendorong peningkatan nilai indeks. Ini adalah proses berkelanjutan untuk memastikan bahwa dasar-dasar digitalisasi pemerintahan telah terbangun dengan baik.

Pergeseran menuju Indeks Pemerintah Digital (IPD) mulai tahun 2026 dan seterusnya, sejalan dengan arahan Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2023 tentang Percepatan Transformasi Digital dan Keterpaduan Layanan Digital Nasional. IPD diharapkan menjadi instrumen pengukuran yang lebih komprehensif, tidak hanya mengukur kematangan implementasi, tetapi juga dampak riil dari digitalisasi terhadap efisiensi layanan, integrasi sistem, dan kepuasan masyarakat.

Dengan demikian, Diskominfo Kabupaten Kediri berkomitmen untuk terus berinovasi dan beradaptasi dengan perkembangan teknologi, memastikan bahwa setiap upaya digitalisasi berkontribusi langsung pada terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transformatif, berintegritas, dan adaptif demi kesejahteraan masyarakat Kediri.

3.3 Program dan Kegiatan

Program dan kegiatan merupakan instrumen kunci dalam mewujudkan rencana strategis setiap Perangkat Daerah, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri. Keduanya adalah penjabaran konkret dari sasaran yang telah ditetapkan, dirancang untuk dapat diukur pencapaiannya. Secara esensial, program dan kegiatan terdiri dari sekumpulan tindakan strategis yang melibatkan pengerahan berbagai sumber daya sebagai masukan (input) untuk menghasilkan keluaran (output) yang terukur. Sumber daya yang dimaksud mencakup:

1. Personal (SDM): Sumber daya manusia yang memiliki kompetensi dan keahlian di bidang terkait.
2. Barang modal: Aset fisik yang mendukung operasional, seperti gedung, kendaraan, dan peralatan.
3. Peralatan dan teknologi: Infrastruktur dan aplikasi teknologi informasi dan komunikasi terkini.
4. Dana: Alokasi anggaran yang diperlukan untuk membiayai seluruh rangkaian kegiatan.
5. Kombinasi: Perpaduan dari beberapa atau kesemua jenis sumber daya tersebut, disesuaikan dengan kebutuhan spesifik masing-masing kegiatan.

Seluruh elemen ini diintegrasikan secara sinergis untuk memastikan setiap program dan kegiatan berkontribusi secara efektif terhadap pencapaian sasaran yang lebih besar, khususnya dalam konteks visi dan misi pembangunan Kabupaten Kediri. Berikut daftar program dan kegiatan Diskominfo Kabupaten Kediri untuk tahun 2026:

1. Urusan Pemerintahan Bidang Komunikasi dan Informatika

1) **Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota,**

Outcome Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota Adalah Tercapainya Dukungan Yang Optimal Untuk Kelancaran Pelaksanaan Urusan Pemerintahan Daerah

1. KEGIATAN

Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah

SUBKEGIATAN

1. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah

2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD

2. KEGIATAN

Administrasi Keuangan Perangkat Daerah

SUBKEGIATAN

1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2. Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
3. Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD
4. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
5. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD
6. Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran

3. KEGIATAN

Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah

SUBKEGIATAN

1. Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD

4. KEGIATAN

Administrasi Umum Perangkat Daerah

SUBKEGIATAN

1. Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
3. Penyediaan Peralatan Rumah Tangga
4. Penyediaan Bahan Logistik Kantor
5. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan
6. Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
7. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD

5. KEGIATAN

Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUBKEGIATAN

1. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor

6. KEGIATAN

Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah

SUBKEGIATAN

1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
3. Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya

2) Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik

outcome Program Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik adalah Meningkatnya jangkauan dan kualitas komunikasi publik pemerintah daerah

1. KEGIATAN

Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

SUBKEGIATAN

1. Relasi Media
2. Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat
3. Pelayanan Informasi Publik
4. Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik
5. Pengelolaan Media Komunikasi Publik
6. Penyusunan Konten

3) **Program Pengelolaan Aplikasi Informatika**,

outcome program Pengelolaan Aplikasi Informatika Meningkatnya kualitas pengelolaan aplikasi informatika

1. KEGIATAN

Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

SUBKEGIATAN

1. Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE
2. Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas

2. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK

1) Program Penyelenggaraan Statistik Sektoral

outcome program PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL adalah Tercapainya kolaborasi, integrasi, dan standardisasi dalam penyelenggaraan Sistem Statistik Nasional (SSN)

1. KEGIATAN

Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota

SUBKEGIATAN

1. Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional
2. Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral
3. Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral
4. Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar

3. URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN

1) Program Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi

outcome Penyelenggaraan Persandian Untuk Pengamanan Informasi program adalah Meningkatnya keamanan siber dan sandi lingkungan pemerintah daerah.

1. *KEGIATAN*

Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota.

SUBKEGIATAN

Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik

Rumusan Rencana Program dan Kegiatan SKPD Tahun 2026

Dan Prakiraan Maju Tahun 2027

Kabupaten Kediri

Kode	Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan	Indikator Kinerja Program/ Kegiatan	Rencana Tahun 2026				Catatan Penting	Prakiraan Maju Rencana Tahun 2027	
			Lokasi	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir	Sumber Dana		Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatir
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		8.239.794.017	DAU			10.007.514.697
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja		Kab. Kediri, Ngasem,		1.180.000	DAU			4.200.000

	Perangkat Daerah		Doko						
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	2 Dokumen	590.000	DAU		2 Dokumen	2.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Laporan	590.000	DAU		1 Laporan	2.100.000
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		6.453.285.223	DAU			7.235.984.358
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	48 Orang/bulan	5.775.085.223	DAU		48 Orang/bulan	6.489.534.123
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	13 Dokumen	530.400.000	DAU		13 Dokumen	534.521.700
	Pelaksanaan Penatausahaan dan	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan	Kab. Kediri,	12 Dokumen	146.030.000	DAU		12 Dokumen	205.628.535

	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Ngasem, Doko						
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	1 Laporan	590.000	DAU		1 Laporan	2.100.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	18 Laporan	590.000	DAU		18 Laporan	2.100.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	2 Dokumen	590.000	DAU		2 Dokumen	2.100.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		45.000.000	DAU			115.500.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Kab. Kediri,	2 Dokumen	45.000.000	DAU		2 Dokumen	115.500.000

			Ngasem, Doko						
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		879.528.000	DAU			1.701.580.339
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	2 Paket	2.300.000	DAU		2 Paket	42.000.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	30.200.000	DAU		4 Paket	120.750.000
	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	181.000.000	DAU		4 Paket	105.261.559
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Paket	2.405.000	DAU		4 Paket	23.100.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem,	5 Paket	5.632.500	DAU		5 Paket	19.720.260

			Doko						
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	3 Dokumen	1.800.000	DAU		3 Dokumen	15.248.520
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	20 Laporan	656.190.500	DAU		20 Laporan	1.375.500.000
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		734.000.794	DAU			845.250.000
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Laporan	420.000.794	DAU		12 Laporan	504.000.000
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	12 Laporan	314.000.000	DAU		12 Laporan	341.250.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		126.800.000	DAU			105.000.000

	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	100	26.300.000	DAU		100	36.750.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	20 Unit	50.500.000	DAU		20 Unit	15.750.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	3 Unit	50.000.000	DAU		3 Unit	52.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		2.000.000.000	DAU			4.984.396.215
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		2.000.000.000	DAU			4.984.396.215
	Relasi Media		Kab. Kediri, Ngasem,	100	900.000.000	DAU		100	3.234.315.000

			Doko						
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		100.000.000	DAU			105.000.000
	Pelayanan Informasi Publik		Kab. Kediri, Ngasem, Doko	100	100.000.000	DAU		100	157.500.000
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		Kab. Kediri, Ngasem, Doko	10	100.000.000	DAU		10	152.192.145
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		Kab. Kediri, Ngasem, Doko	20	700.000.000	DAU		20	1.072.889.070
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	900 Konten	100.000.000	DAU		900 Konten	262.500.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		3.000.000.000	DAU			5.569.609.500

	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		3.000.000.000	DAU			5.569.609.500
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	4 Laporan	2.950.000.000	DAU		4 Laporan	608.359.500
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	2 Dokumen	50.000.000	DAU		2 Dokumen	4.961.250.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		574.000.000	DAU			289.452.554
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		574.000.000	DAU			289.452.554
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		574.000.000	DAU			289.452.554

	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	90 %	400.000.000	DAU		90 %	68.839.218
	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	90 %	50.000.000	DAU		90 %	77.658.115
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	90 Orang	50.000.000	DAU		90 Orang	51.118.074
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	90 %	74.000.000	DAU		90 %	91.837.147
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		501.000.000	DAU			854.437.500
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		501.000.000	DAU			854.437.500

	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		Kab. Kediri, Ngasem, Doko		501.000.000	DAU			854.437.500
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Kab. Kediri, Ngasem, Doko	6 Laporan	501.000.000	DAU		6 Laporan	854.437.500

Tabel 3.1

BAB IV
RENCANA KERJA DAN PENDANAAN PERANGKAT DAERAH

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2026 telah disusun secara komprehensif, mencerminkan komitmen dinas dalam mendukung Visi pembangunan daerah. Renja ini merupakan penjabaran detail dari tujuan strategis Diskominfo, yang didukung dengan alokasi pendanaan yang terencana. Secara keseluruhan, Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini terdiri dari:

- **3 Urusan**
- **5 Program**
- **10 Kegiatan**
- **34 Sub Kegiatan** (Rincian jumlah sub kegiatan akan terlampir dalam Tabel 4.1.)

Struktur ini memastikan bahwa setiap aspek tugas dan fungsi Diskominfo, mulai dari urusan komunikasi dan informatika, statistik, hingga persandian, terkoordinasi dalam program-program yang jelas, dengan kegiatan yang spesifik, dan didukung oleh sub kegiatan yang terperinci. Ini adalah langkah fundamental untuk mencapai efisiensi, akuntabilitas, dan efektivitas dalam pemanfaatan anggaran demi terwujudnya tata kelola pemerintahan digital yang optimal di Kabupaten Kediri.
Sebagaimana rincian lengkapnya dapat dilihat pada **Tabel 4.1** berikut:

Rekapitulasi Rencana Kerja dan Pendanaan

Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Kediri Tahun 2026

NO	PROGRAM DAN KEGIATAN	INDIKATOR PROGRAM DAN KEGIATAN	BELANJA LANGSUNG (Rp).
	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/ KOTA		8.239.794.017
	Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah		1.180.000
	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	590.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar	590.000

	Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
	Administrasi Keuangan Perangkat Daerah		6.453.285.223
	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	5.775.085.223
	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	Jumlah Dokumen Hasil Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN	530.400.000
	Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD	146.030.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD	590.000
	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD	Jumlah Laporan Keuangan Bulanan/ Triwulanan/ Semesteran SKPD dan Laporan Koordinasi Penyusunan Laporan Keuangan Bulanan/Triwulanan/Semesteran SKPD	590.000
	Penyusunan Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	Jumlah Dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi Anggaran	590.000
	Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat Daerah		45.000.000
	Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	Jumlah Dokumen Pengamanan Barang Milik Daerah SKPD	45.000.000
	Administrasi Umum Perangkat Daerah		879.528.000
	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	2.300.000
	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	30.200.000

	Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	181.000.000
	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	2.405.000
	Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	5.632.500
	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-Undangan yang Disediakan	1.800.000
	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	656.190.500
	Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		734.000.794
	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	420.000.794
	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	314.000.000
	Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah		126.800.000
	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	0	26.300.000
	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	50.500.000
	Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	50.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN INFORMASI DAN KOMUNIKASI PUBLIK		2.000.000.000
	Pengelolaan Informasi dan Komunikasi		2.000.000.000

	Publik Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		
	Relasi Media		900.000.000
	Kemitraan Komunikasi dengan Komunitas Informasi Masyarakat		100.000.000
	Pelayanan Informasi Publik		100.000.000
	Monitoring Informasi Kebijakan, Opini, dan Aspirasi Publik		100.000.000
	Pengelolaan Media Komunikasi Publik		700.000.000
	Penyusunan Konten	Jumlah Konten Informasi Publik	100.000.000
	PROGRAM PENGELOLAAN APLIKASI INFORMATIKA		3.000.000.000
	Pengelolaan E-government di Lingkup Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		3.000.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	Jumlah laporan Pelaksanaan Kegiatan Fasilitasi Promosi Literasi SPBE dan/atau kolaborasi penyelenggaraan SPBE	2.950.000.000
	Koordinasi dan Fasilitasi Penyelenggaraan Kabupaten atau Kota Cerdas	Jumlah laporan pelaksanaan koordinasi dan fasilitasi penyelenggaraan Kabupaten/ Kota Cerdas	50.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG STATISTIK		574.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN STATISTIK SEKTORAL		574.000.000
	Penyelenggaraan Statistik Sektoral di Lingkup Daerah Kabupaten/Kota		574.000.000
	Pengelolaan Kegiatan Statistik Sektoral Dalam Sistem Statistik Nasional	Persentase kegiatan statistik sektoral yang sudah mendapatkan rekomendasi dari pembina data statistik	400.000.000

	Peningkatan Kualitas Statistik Sektoral	Persentase kegiatan statistik sektoral yang hasilnya dapat diakses oleh pengguna data.	50.000.000
	Pengingkatan Kapasitas Kelembagaan Statistik Sektoral	Jumlah pegawai yang mendapatkan pelatihan di bidang statistik	50.000.000
	Pelaksanaan Proses Bisnis Statistik Sektoral Sesuai Standar	Persentase kegiatan statistik yang dilengkapi dokumen perencanaan kegiatan statistik sektoral	74.000.000
	URUSAN PEMERINTAHAN BIDANG PERSANDIAN		501.000.000
	PROGRAM PENYELENGGARAAN PERSANDIAN UNTUK PENGAMANAN INFORMASI		501.000.000
	Penyelenggaraan Persandian untuk Pengamanan Informasi Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota		501.000.000
	Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	Jumlah Laporan Pelaksanaan Keamanan Informasi Pemerintahan Daerah Provinsi Berbasis Elektronik dan Non Elektronik	

Tabel 4.1

BAB V
PENUTUP

1. SIMPULAN

Rencana Kerja (Renja) Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini bukan sekadar dokumen perencanaan, melainkan sebuah komitmen nyata kami untuk terus berinovasi dan berkontribusi secara signifikan dalam mewujudkan Visi Kabupaten Kediri yang semakin maju dan terdigitalisasi. Sepanjang tahun 2026, kami telah mengidentifikasi berbagai program dan kegiatan strategis yang berfokus pada penguatan infrastruktur digital, peningkatan kualitas data, penyebarluasan informasi yang transparan dan akuntabel, serta penguatan keamanan siber.

Melalui Renja 2026 ini, Diskominfo Kabupaten Kediri akan secara proaktif mendorong percepatan transformasi digital di seluruh lini pemerintahan daerah. Kami akan terus memperkuat fondasi data statistik yang akurat dan relevan, menjadi tulang punggung bagi perencanaan dan pengambilan kebijakan yang tepat. Upaya peningkatan pengelolaan informasi dan komunikasi publik akan terus digencarkan, memastikan masyarakat Kediri mendapatkan akses informasi yang cepat, mudah, dan terpercaya melalui berbagai kanal digital. Tidak kalah penting, kami akan terus memperkukuh pertahanan keamanan siber untuk melindungi sistem dan data pemerintah daerah dari berbagai ancaman, sekaligus menjaga kepercayaan publik.

Kami menyadari bahwa keberhasilan pelaksanaan Renja 2026 ini sangat bergantung pada sinergi dan kolaborasi yang kuat. Oleh karena itu, Diskominfo Kabupaten Kediri siap menjadi mitra strategis bagi seluruh Organisasi Perangkat Daerah (OPD), dunia usaha, dan yang terpenting, seluruh lapisan masyarakat Kabupaten Kediri. Melalui kerja sama yang erat, kami yakin dapat menciptakan ekosistem digital yang inklusif, responsif, dan memberikan manfaat maksimal bagi kesejahteraan bersama.

Dengan semangat optimisme dan dedikasi, kami berharap Renja Diskominfo Kabupaten Kediri Tahun 2026 ini dapat menjadi panduan yang efektif dalam melangkah, memastikan setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan memberikan dampak positif yang terukur, serta membawa Kabupaten Kediri menuju era digital yang lebih cemerlang.

2. HARAPAN

Keberhasilan pelaksanaan Rencana Kerja Tahun 2026 ini sangat bergantung pada komitmen dan kerja sama seluruh jajaran Dinas Komunikasi dan Informatika, serta dukungan penuh dari berbagai pihak terkait, baik di lingkungan internal Pemerintah Kabupaten Kediri maupun mitra eksternal. Kami berharap, dengan implementasi Renja ini, Dinas Komunikasi dan Informatika dapat secara signifikan meningkatkan kualitas layanan publik, efisiensi birokrasi, dan transparansi informasi di Kabupaten Kediri.

Melalui upaya kolektif dan sinergi yang kuat, kami yakin Rencana Kerja ini bukan hanya sekadar dokumen perencanaan, melainkan peta jalan nyata menuju Kabupaten Kediri yang semakin cerdas, inovatif, dan berdaya saing di era digital. Semoga Allah SWT/Tuhan Yang Maha Esa senantiasa melimpahkan rahmat dan petunjuk-Nya dalam setiap langkah kita.

Kediri,

Plt. KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
KABUPATEN KEDIRI

NUR MIFTAHUL FUAD

BUPATI KEDIRI

HANINDHITO HIMAWAN PRAMANA